



**AKUNTABILITAS PERENCANAAN DANA DESA
DI KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Oleh

Nama : **FARAH DINA DEWI NAVULANI**
NPM : 2116500019

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARAH DINA DEWI NAVULANI

NPM : 2116500019

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa skripsi dengan Judul **AKUNTABILITAS PERENCANAAN DANA DESA DI KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019** adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain yang tingkat kemiripannya 90% dan muncul permasalahan terkait penelitian yang telah saya lakukan. Maka saya bertanggung jawab terhadap keseluruhan **SKRIPSI** ini.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran.

Tegal, 27 Juli 2021



FARAH DINA D.N

2116500019



**AKUNTABILITAS PERENCANAAN DANA DESA DI
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN
2019**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu
(S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tegal, 27 Juli 2021

Telah disetujui oleh,

Dosen Pembimbing I

Drs. Djoko Suyono, M.Si

NIPY. 2451891956

Dosen Pembimbing II

Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si

NIPY. 14251921973

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dha Padma Eldo, S.IP, M.IP
NIPY. 2766861992



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
(Terakreditasi B)

Jl. Halmahera KM. 1 Tegal Telp (0283) 323290




PENGESAHAN

AKUNTABILITAS PERENCANAAN DANA DESA DI KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

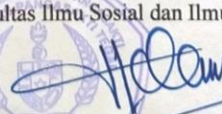
Telah dipertahankan dalam sidang terbuka skripsi Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Pada hari : Selasa

Tanggal : 27 Juli 2021

1. Ketua Dewan Penguji : Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si ()
NIP. 196305271988032001
2. Sekretaris Dewan Penguji : Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si ()
NIPY. 14251921973
3. Anggota Dewan Penguji : Drs. Djoko Suyono, M.Si ()
NIPY. 2451891956

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Nuridin SH, MH
NIPY. 9351091960

MOTTO

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya.” (Q.S Al-Zalzalah:7)

“Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Q.S Al-Anfaal:46)

“Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Hadid:4)

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu.” (Bobby Unser)

“Jangan biarkan hari kemarin merenggut banyak hal hari ini”. (Will Rogers)

“Hidup dapat dipahami dengan berpikir ke belakang, tapi ia juga harus dijalani dengan berpikir kedepan”. (Soren Kiekegaard)

“Kunci kesuksesan adalah dengan cara kita disiplin dan mengatur waktu sebaik mungkin agar usaha kita berjalan dengan tepat waktu”. (Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi yang telah selesai ini tentu mengalami suka maupun duka didalam proses pembuatan dan penyusunannya, maka dari itu peneliti ingin mempersembahkan karya ilmiah ini untuk :

1. Allah SWT sebagai rasa syukur atas kekuasaan dan perlindungan-Nya, telah memberikan rahmat, hidayah dan karomah serta kesehatan dan semangat dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir.
2. Keluargaku tercinta, terutama kedua orang tuaku papah mamah dan adik-adiku Salsha Bella dan Mohammad Akhbar. Untuk adik perempuanku yang selalu menemani bimbingan. Untuk papah mamah yang selalu mendo'akan selalu terimakasih atas dampingan dan do'anya, sehingga saya dapat melewati segala rintangan dan halangan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Semua Dosen dan Dekan FISIP tanpa terkecuali yang sudah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi pelaksanaan dan selesainya penelitian ini.
4. Teman-teman dari FISIP maupun dari fakultas lain dari semester bawah sampai semester atas yang selama ini selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak terkait, yang turut membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini dari awal sampai akhir.

ABSTRAK

Nama Navulani Dewi Dina, Farah. NPM 2116500019. 2019. Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa Di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I : Drs. Djoko Suyono. M.Si dan Pembimbing II : Unggul Sugiharto. S.IP, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas perencanaan dana desa Di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019 dan juga mengetahui kendala serta solusi dari akuntabilitas perencanaan dana desa Di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha mendiskripsikan secara jelas tentang Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa Di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Akuntabilitas menurut Hariawan Bihamding (2019:62).

Hasil penelitian menggambarkan bahwa akuntabilitas perencanaan dana desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi masih ada beberapa kendala dalam akuntabilitas perencanaan dana desa yaitu sebagai berikut : a. Pada tahap transparansi kurangnya keterbukaan kepada masyarakat tidak adanya papan informasi tentang dana desa; b. Kurangnya sumber daya manusia; c. Dalam perencanaan dana desa kurang maksimal dalam membuat laporan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Perencanaan Dana Desa

ABSTRACT

Name Navulani Dewi Dina, Farah. NPM 2116500019. 2019. Accountability of Village Fund Planning in Bodeh District, Pemalang Regency in 2019. Thesis, Government Science, Pancasakti University, Tegal. Advisor I : Drs. Djoko Suyono. M.Si and Advisor II : Unggul Sugiharto. S.IP, M.Si.

This study aims to find out how the accountability of village fund planning is in the Bodeh District, Pemalang Regency in 2019 and also to find out the obstacles and solutions to the accountability of village fund planning in the Bodeh District, Pemalang Regency in 2019.

The type of research used is a qualitative descriptive type of research, namely the type of research that seeks to clearly describe the Accountability of Village Fund Planning in the Bodeh District, Pemalang Regency in 2019. The theory used in this study is the Accountability theory according to Hariawan Bihamding (2019: 62).

The results of the study illustrate that the accountability of village fund planning in Bodeh District, Pemalang Regency is running well and smoothly. However, there are still some obstacles in the accountability of village fund planning, namely as follows: a. At the transparency stage, there is a lack of openness to the community, there is no information board about village funds; b. Lack of human resources; c. In planning village funds, it is less than optimal in making reports.

Keywords: *Accountability, Village Fund Planning*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT pendengar semua doa dan semua harapan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019”.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- a. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan studi di Universitas Pancasakti Tegal.
- b. Dr. Nuridin, SH, MH., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian.
- c. Dha Padma Eldo, S.IP, M.IP., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah membantu dalam kelancaran skripsi ini.
- d. Drs. Djoko Suyono, M.Si dan Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si., dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi yang sangat bermanfaat kepada peneliti demi terselesaikannya skripsi ini.

- e. Drs. Djoko Suyono, M.Si., dosen wali yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama peneliti melaksanakan studi Universitas Pancasakti Tegal.
- f. Bapak/Ibu dosen dan staf TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membekali ilmu pengetahuan dan membantu dengan administrasi selama peneliti menuntut ilmu di Universitas Pancasakti Tegal.
- g. Bapak Riyanto dari DINPERMADES, yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.
- h. Bapak Joko Prawoto pendamping desa dari Kecamatan Bodeh, yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.
- i. Bapak Kepala Desa sekaligus Sekretaris, Bendahara Desa dan Warga desa Muncang, yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Tegal, 27 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	i
Pernyataan Penulis	ii
Lembar Persetujuan Skripsi	iii
Lembar Pengesahan Skripsi	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Skema	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
II.1 Penelitian Terdahulu	10
II.2 Kerangka Teori	14
II.2.1 Pengertian Manajemen	14
II.2.2 Perencanaan Dana Desa	15
II.2.3 Pemerintahan Desa	17

II.2.4 Dana Desa	21
II.2.5 Akuntabilitas Dana Desa	25
II.3 Definisi Konsep	33
II.4 Pokok Penelitian	34
II.5 Alur Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	
III.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian	37
III.2 Jenis dan Sumber Data	39
III.3 Informan Penelitian	40
III.4 Teknik Pengumpulan Data	40
III.5 Teknik Analisa Data	43
III.6 Sistematika Penulisan	46
BAB IV DESKRIPSI PENELITIAN	
IV.1 Profil Kecamatan Bodeh	48
IV.2 Profil Desa Muncang	75
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
V.1 Hasil Penelitian	84
1. Akuntabilitas	84
2. Perencanaan Dana Desa	85
V.2 Pembahasan atas Hasil Penelitian	104
BAB VI PENUTUP	
VI.1 Kesimpulan	106
VI.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel I.01 Rencana Penggunaan Dana Desa di Desa Muncang Tahun 2019	6
Tabel II.01 Penelitian Terdahulu	12
Tabel IV.01 Luas Penggunaan Lahan (Ha) Menurut Jenisnya per Desa	51
Tabel IV.02 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Desa	53
Tabel IV.03 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok dan Umur per Desa	54
Tabel IV.04 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan per Desa	55
Tabel IV.05 Mata Pencarian Menurut Jenisnya per Desa	56
Tabel IV.06 Jumlah Penganut Agama per Desa	57
Tabel IV.07 Sarana Prasarana dalam menunjang perekonomian	66
Tabel IV.08 Banyaknya Sarana Kesehatan di Kecamatan Bodeh	73
Tabel IV.09 Sarana yang terdapat di Kecamatan Bodeh	74
Tabel IV.10 Prasarana yang terdapat di Kecamatan Bodeh	75
Tabel IV.11 Sarana yang terdapat di Desa Muncang	82
Tabel IV.12 Prasarana yang terdapat di Desa Muncang	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.01 Peta Administratif Kecamatan Bodeh	50
Gambar IV.02 Peta Desa Muncang	77

DAFTAR SKEMA

Skema II.01 Alur Pikir	36
Skema III.01 Proses Analisis Data	45
Skema IV.01 Struktur Kecamatan Bodeh	60
Skema IV.02 Struktur Pemerintahan Desa Muncang	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	113
Lampiran 2 Surat Prariset	118
Lampiran 3 Surat Riset	119
Lampiran 6 Dokumentasi	122
Lampiran 7 Berita Acara Bimbingan Skripsi	124
Lampiran 8 Berita Acara Ujian Skripsi	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya terdapat peraturan mengenai otonomi daerah bahwa dalam hal ini pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan pemerintah secara mandiri dan bertanggung jawab dalam perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan peraturan mengenai otonomi daerah dimulai dari pemerintah daerah. Daerah dalam hal ini mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Hak dan kewajiban diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah yang dijelaskan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Menurut (Hariawan Bihamding, 2019) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintahan dituntut untuk bersikap akuntabel dan transparan, dengan begitu pemerintah harus siap dan mampu menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan informasi secara terbuka tentang berbagai kebijakan, terutama menyangkut kebijakan publik seperti rencana pembangunan yang menggunakan dana masyarakat melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik apabila

didukung dengan kinerja pemerintah yang jujur, berintegritas dan bertanggung jawab atas kinerjanya, kemudian transparansi akan berjalan dengan baik jika pemerintah menjalankan kinerjanya secara terbuka kepada masyarakat serta adanya sifat partisipatif dari masyarakat untuk mendukung kinerja pemerintahan desa itu sendiri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu desa diberikan kesempatan besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Di dalam pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Adapun menurut (Sadu Wasistiono dan M Irwan Tahir, 2019) bahwa masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa berkewajiban untuk memimpin desa sekaligus sebagai pimpinan pemerintahan desa BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi kepala desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa, BPD dan masyarakat desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil dari musyawarah desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan desa. Tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar desa secara mandiri menyelenggarakan pembangunan desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan. Dalam penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu rencana pengguna dana desa wajib dibahas dan sepakati dalam musyawarah desa yakni, peningkatan kualitas hidup manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Fenomena adanya akuntabilitas perencanaan dana desa masih banyak aparat desa yang melakukan kinerja pemerintahannya belum sesuai standar dan aturan yang berlaku, minimnya keterbukaan pemerintah kepada masyarakat terkait anggaran dan rencana dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat sehingga

kegiatan tersebut tidak terealisasi secara maksimal. Diperlukan adanya kinerja aparat pemerintah desa dan badan pengawas desa juga diperlukan peran dari masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapatkan dari pemerintah pusat. Mulai dari tahap perencanaan dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga penerapan dalam pembangunan desa dapat dimaksimalkan dengan baik (Sadu Wasistiono dan M Irwan Tahir, 2019).

Akuntabilitas perencanaan dana desa menjadi perhatian penting dalam berkembangnya kinerja perangkat desa yang ada. Desa mempunyai peran strategis sebagai elemen dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan proses pembangunan. Semua dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Berkaitan dengan peran tersebut diatur didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam akuntabilitas perencanaan dana desa yaitu Desa Muncang menggunakan aplikasi siskeudes yaitu alat bantu yang diperuntukan untuk Pemerintah Desa secara komputerisasi.

Didalam mengelola dana desa Perbup No. 38 Tahun 2018 di Kabupaten Pemalang menjelaskan tentang memerlukan tahap perencanaan. Mulai dari proses perencanaan dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, sehingga penerapannya dalam perencanaan dana desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Sedangkan menurut Hariawan Bihamding (2019:1) Perencanaan dana desa merupakan kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang.

Dalam perencanaan dana desa dari desa Muncang yaitu dalam perencanaannya “menurut bendahara Iwan mengatakan pada tahap perencanaan selama 6 tahun ada didalam RPJMDes yang terangkum di RPJMDes semua menjadi skala prioritas dari RPJMDes dibuat menjadi RKP pada tahap ini rincian perencanaan ada di aplikasi siskeudes. Tahap pelaksanaan dibuat swakelola, pada tahap penatausahaan kurang maksimal, tahap pelaporannya dibuat spj oleh sekdes dan bendahara, dan ditahap pertanggungjawaban laporan dibagi menjadi 2 yaitu tahap 1 40%, tahap 2 40%, dan tahap 3 20% pada tahap 1 dan 2 sudah terkirim sedangkan dikegiatan sendiri sudah terlaksana dengan baik”.

Dari desa Muncang dalam menjalankan kegiatan laporan kegiatan perencanaan sudah baik hanya saja dalam transparansi kurangnya keterbukaan kepada masyarakat misalnya tidak ada papan informasi mengenai dana desa, Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan pasti menggunakan pedoman perbup tentang pelaksanaan dana desa. Karena kalau tidak mengikuti pedoman tersebut dana desa tidak bisa cair dari pusat oleh karena itu pemerintah desa harus mengikuti pedoman dana desa supaya ditahun berikutnya dana desa akan cair.

Berikut data diperoleh dalam rencana penggunaan anggaran Desa Tahun 2019 :

Tabel I.01

Rencana Penggunaan Dana Desa di Desa Muncang Tahun Anggaran 2019

No	Bidang	Biaya (Rp)	Realisasi
1	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 944.830.200	Rp 944.830.200
2	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 50.700.000	Rp 50.700.000
3	Pemberdayaan Masyarakat	Rp 169.163.800	Rp 169.163.800
Jumlah		Rp 1.164.694.000	

(Sumber : Sekretaris Desa Muncang 2019)

Berdasarkan tabel diatas merupakan data yang diperoleh dari desa Muncang dalam melaksanakan rencana penggunaan dana desa tahun 2019. Data tersebut mempunyai bidang-bidang yang berbeda yaitu ada bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dan di dalam penggunaan dana desa Desa Muncang menghabiskan biaya dalam pelaksanaan dana desa sebesar 1.164.694.000.

Dari desa Muncang dalam akuntabilitas perencanaan dana desa dalam transparansi kurang maksimal karena kurangnya keterbukaan kepada masyarakat, dari sisi partisipatifnya juga kurang karena masyarakat lebih sedikit mengikuti kegiatan desa. Dan dalam membuat laporan baik hanya saja dalam pelaksanaan kurang maksimal ada sebagian pembangunan desa dari fisik kurang dalam pelaksanaan. Dari latar belakang diatas maka peneliti termotivasi untuk meneliti

dengan mengajukan judul : **AKUNTABILITAS PERENCANAAN DANA DESA DI KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 (studi kasus di Desa Muncang).**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2018:35) masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Jadi rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Di dalam identifikasi masalah pengelolaan dana desa ada pertanggungjawaban dari dana desa dan menggunakan e-government. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan dana desa di Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019?
2. Adakah kendala dan solusi dalam akuntabilitas perencanaan dana desa di Desa Muncang Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian pasti ada maksud dan tujuan ingin dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas perencanaan dana desa di Desa Muncang Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun 2019.
2. Untuk mendeskripsikan adakah kendala dan solusi dalam akuntabilitas perencanaan dana desa di Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah terkait dengan perencanaan dalam Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa di Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat di kontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai perencanaan dana desa khususnya di Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dapat dijadikan pembelajaran dan menambah wawasan peneliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian dapat menambah pengetahuan melalui fakta-fakta empiris yang disusun dalam skripsi.
- b. Bagi Pemerintah Desa Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan masalah atau masukan kepada pemerintah di Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
- c. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk mengambil keputusan maupun kebijakan dalam tata kelola keuangan desa.
- d. Bagi masyarakat pada desa-desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang mengenai akuntabilitas perencanaan dana desa sehingga

ikut serta dalam mensukseskan akuntabilitas perencanaan dana desa serta berpartisipasi dan bertanggungjawab.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Hoy dan Miskel dalam Sugiyono (2010:55) Teori ialah seperangkat konsep yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Sedangkan konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (Soedjadi, 2000:14).

II. 1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian tentang beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkenaan objek serta pokok permasalahan yang sekiranya memiliki hubungan sama erat dengan penelitian akan dilakukan. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2017:7) adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selajutnya di samping itu kajian terdahulu membantu dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Ada tiga penelitian yang terkait dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, namun tentunya dengan konsep, dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Penelitian pertama mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada jurnal riset akuntansi dan keuangan, 2 (3), 2014 oleh Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman Universitas Jember (UNEJ) Penelitian ini dilakukan di

Kecamatan Umbulsari dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan sehingga pengelolaan ADD diharapkan mampu dipertanggungjawabkan dengan baik.

Di dalam skripsi Anggit Wahyu Pambudi di Kabuapten Pematang Jaya (2018) tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, Penelitian ini untuk mengetahui prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada tiga tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pematang Jaya No.58 tahun 2015. Pada tahap perencanaan pemerintah desa terbuka dalam kepada masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam merencanakan kegiatan. Pada tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan bahwa kegiatan pembangunan tertib dan sesuai standar. Dan tahap pertanggungjawaban kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.

Serta didalam Jurnal Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko dan Taufik Kurrohman Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember (UNEJ) penelitian ini berisi tentang sistem akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi dana desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa dalam akuntabilitas perencanaan dana desa didalam pengelolaannya ada yang sudah melaksanakan dengan baik tetapi ada yang mempunyai kendala didalam sumber daya manusianya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan membahas mengenai Akuntabilitas perencanaan dana desa di Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

Tabel II.01
Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PENULIS/JURNAL	ISI
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2 (3), 2014 oleh Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman Universitas Jember (UNEJ)	Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Umbulsari dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan sehingga pengelolaan ADD diharapkan mampu dipertanggungjawabkan.
2.	Akuntabilitas	Skripsi Anggit Wahyu	Penelitian ini berisi tentang prinsip

	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Wilayah Desa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang) Tahun 2015 s/d 2016	Pambudi di Kabupaten Pemalang (2018), Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang	akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dengan mendeskripsikan dan menjelaskan alur-alur serta sistem pengalokasian dana desa melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban.
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	e-Journal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. IV No.2 2014 oleh Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko dan Taufik Kurrohman Universitas Jember (UNEJ)	Dalam penelitian ini berisi tentang penerapan sistem akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan sehingga pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini prinsip akuntabilitas perencanaan dana desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dari aspek pelaksanaannya. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penulis akan mendeskripsikan di dalam akuntabilitas perencanaan dana desa di Pemerintah Desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten

Pemalang. Untuk menganalisis akuntabilitas perencanaan dana desa tersebut, peneliti menggunakan indikator akuntabilitas menurut (Nordriawan, 2006:28) yaitu mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan. Serta peneliti juga menggunakan indikator perencanaan dana desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yakni akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Nantinya penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan dengan jelas akuntabilitas perencanaan dana desa di desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Kerangka teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang terusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (Cooper dan Schindler dalam Sugiyono 2003:53).

II.2 Kerangka Teori

II.2.1 Pengertian Manajemen

Menurut James AF Prentice (1982:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen merupakan pemuasan kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan sosial karena bersifat produktif bagi manusia, bagi perekonomian dan bagi masyarakat. Dari definisi manajemen bahwa menggunakan kata proses, bukan seni. Suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan, proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen yaitu, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Perencanaan berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan pada berbagai metode, rencana atau logika bukan hanya atas dasar dugaan atau firasat.

II.2.2 Perencanaan Dana Desa

1) Pengertian Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan. Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan (Abe, 2005:27).

Menurut Terry (2005:3) perencanaan merupakan upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperhatikan untuk mencapai hasil yang di inginkan.

Adapun menurut Conyers dan Hills (2008) bahwa perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan atas berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasa yang akan datang.

2) Perencanaan Dana Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa dana desa adalah sebagai berikut:

“Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.”

Perencanaan dana desa ialah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan elemen masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) terkait dengan pengalokasian sumber daya desa dan pemanfaatan untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) digunakan sebagai acuan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), rancangan RPJMDes berisi penjelasan visi dan misi kepala desa dan kebijakan mengenai rencana pembangunan desa sedangkan RKPDDes merupakan penjabaran dari RPJMDes dengan jangka waktu satu tahun berisi rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang disusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pengelolaan dana desa diakhiri dengan hasil evaluasi rancangan APBDes oleh Bupati dan Walikota (Permendagri, 2018).

Adapun menurut Erly Suandy (2001:2) merupakan suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-trategi, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara menyeluruh.

Sedangkan menurut Hariawan Bihamding (2019:66-67) Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam

kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

II.2.3 Pemerintahan Desa

1) Pengertian Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan kesatuan wilayah dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap

dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Dan desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota, desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Desa memiliki kewenangan sesuai di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna kemajuan pembangunan.

Oleh karena itu desa merupakan self community yakni komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah (UU Nomor 6 pasal (5) Tahun 2014).

Menurut Sutardjo Kartodikusumo (2002) desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari situlah terbukti bahwa kesatuan masyarakat hukum, yaitu warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak tau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa. Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun), sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa.

2) Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:3) bahwa sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Pemerintah Desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan perwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara demokratis (UU No. 6 2014 Pasal 56).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Desa:

“Pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (3):

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala-kepala urusan, yakni pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan ialah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

II.2.4 Dana Desa

1) Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, juga lain-lain pendapatan desa yang sah. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan

kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada APBN bahwa besaran dana desa setiap kabupaten/kota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa diwilayahnya. Besaran Dana Desa setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa dihitung dengan bobot:

- a) 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
- b) 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa;
- c) 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.

Menurut Permendesa (PDTT) No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana desa tahun 2020 pasal 12 bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus dari pemberdayaan masyarakat desa ialah mewujudkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan dan desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa desa merupakan subyek hukum. Posisi desa sebagai subyek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban

terhadap aset dan sumber daya yang menjadi miliknya. karenanya dana desa sebagai bagian pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari kewenangan desa. Dalam prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa: peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa bersumber pada belanja pemerintah dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkelanjutan. Dana APBN yang diperuntukan bagi desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Agar meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2) Tujuan Dana Desa

Tujuan Dana Desa secara umum ialah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial antar warga di desa.

- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan desa.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.
- d. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Alokasi anggaran pendapatan dan Belanja Negara kepada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara. Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa (Indrawati 2017).

II.2.5 Akuntabilitas Dana Desa

1) Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas merujuk kepada seseorang atau badan hukum yang mempunyai kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban, menjawab dan menjelaskan kinerja atas tindakan yang telah dilakukan kepada pihak yang mempunyai hak dan wewenang meminta pertanggungjawaban (Fajri, 2015).

Menurut Darise (Darise, 2006:25) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (Sedarmayanti, 2009) akuntabilitas merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada dalam jalur otoritasnya atau sudah berada jauh diluar tanggungjawab dan kewenangannya. Setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan lingkungan. Ada 4 dimensi yang membedakan akuntabilitas, ialah siapa harus melaksanakan akuntabilitas, apa standar digunakan untuk penilaian akuntabilitas, dan nilai akuntabilitas itu sendiri.

Adapun menurut Nordiawan (2006:28) Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periode. Transparan ialah prinsip menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Sedangkan menurut Sabeni dan Ghazali (2001) tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola yakni akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan salah satu bentuk keharusan seseorang pemimpin untuk menjamin bahwa tugas kewajiban diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut LAN (LAN 2003) Bahwa setiap tindakan, kegiatan, atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Sedangkan menurut Hariawan Bihambing (Hariawan Bihambing 2019:64) Bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang

dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipatif merupakan prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran ialah bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dilakukan pencatatan atas penggunaannya sesuai prinsip akuntansi keuangan di desa. Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai prinsip akuntansi keuangan desa.

Serta menurut Andrianto (2007) bahwa akuntabilitas adalah setiap hasil akhir tindakan yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sedangkan menurut Kartika et al (2018) Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh individu atau kelompok didasari tanggungjawab demi tercapai keterbukaan dan integritas untuk kesejahteraan bersama.

Akuntabilitas merupakan individu atau kelompok jabatan mempertanggung jawabkan atas kegiatan yang dilakukan sehingga dapat memperbaiki kinerja dan kualitas pemerintah desa supaya tercapai pemerintah yang transparan dan berorientasi terhadap kepentingan publik (Nasution, 2015).

Menurut Waluyo (2009:195) Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi

pada kepentingan publik. Dari konsep akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Dalam akuntabilitas ada kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandate untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan ataupun tulisan. Sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011:71).

Sedangkan menurut Wahyudi Kumorotomo (2013:3-4) Akuntabilitas ialah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Menurut Mahmudi akuntabilitas dalam lembaga publik dapat dibagi menjadi lima bagian yakni:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas penegakan hukum dan norma juga kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.

- b. Akuntabilitas Manajerial, merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
- c. Akuntabilitas Program, merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan setiap program yang akan dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini harus bisa menunjukkan jika program yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang dapat dilakukan agar program yang akan direncanakan dapat berjalan dengan optimal.
- d. Akuntabilitas Kebijakan, merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan ataupun diambil. Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan baik itu dari segi tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan, hingga berbagai macam hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari setiap kebijakan yang akan atau telah diambil.
- e. Akuntabilitas Finansial, merupakan akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap setiap uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintahan. Lembaga publik harus bisa menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan, dan berbagai macam pertanggungjawaban lainnya.

Menurut (Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, 2019) di dalam pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban yaitu :

1. Dari segi Pelaksanaan

- a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai dengan ketetapan pemerintah kabupaten atau kota dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
- b. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain ditetapkan dalam Perdes.
- c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan Bupati atau Wali kota.
- d. Pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan disahkan kepala desa.

2. Dari segi Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a. Kepala desa menyampaikan laporan kepada Bupati atau Wali kota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes.
- c. Lampiran format laporan adalah sebagai berikut:
 - Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

- Kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- Program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa.

Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat dilihat dari sebagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada dana desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta sebagaimana partisipasi masyarakat dalam keberhasilan program yang direncanakan.

Akuntabilitas adalah sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sumber kontrol internal bertolak pada kewenangan yang melekat pada hubungan formal secara hirarki atau hubungan sosial informal dengan agen publik. Sumber kontrol eksternal suatu pemisahan yang serupa, dimana kewenangan mereka dapat dibedakan dalam kewenangan yang berasal dari serangkaian peraturan atau pelaksanaan kekuasaan secara informal oleh kepentingan yang berasal dari luar agen publik (Rahmat 2009).

Sementara menurut Koppell (Koppell 2005) mengajukan lima dimensi tersebut ialah transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Kelima kategori itu tidaklah mutually exclusive, yaitu organisasi bisa saja akuntabel dilihat dari beberapa pandangan. Meski demikian, transparansi dan

liabilitas dalam mendasari konsep akuntabilitas dalam segala bentuk manifestasinya.

Akuntabilitas dalam penyelenggaranya pemerintahan daerah bahwa sebagai kewajiban daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno, 2007:129).

Akuntabilitas publik ialah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2002:28).

Konsep akuntabilitas adalah setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program. Di dalam pemerintahan desa mempunyai laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas yaitu asas yang dipatuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa supaya dapat dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat desa dan pemerintah secara umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hariawan Bihamding, 2019).

Sedangkan menurut (Hariawan Bihamding, 2019) Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada dana desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta sebagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan.

II.3 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Effendi (2009) mengemukakan definisinya mengenai konsep, Konsep adalah sekelompok fenomena generalisasi maka beberapa fenomena bisa diceritakan sebagai sebuah fenomena yang sama. Konsep dapat diartikan sebagai unsur dari suatu penelitian berupa definisi, ialah penjabaran secara umum ini digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu gejala sosial menjadi objek penelitian.

Definisi konsep adalah definisi menggambarkan suatu abstrak dari hal-hal yang perlu diamati sehingga akan mempermudah penjelasan dan penjernihan masalah-masalah agar mudah dimengerti, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai arti digunakan dalam penelitian.

Definisi konsep yang peneliti ajukan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas adalah setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program, yang dikelola dengan asas-asas yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran.
2. Perencanaan Dana Desa adalah suatu kegiatan untuk memperkirakan laporan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang.

II.4 Pokok Penelitian

Pokok-pokok penelitian merupakan suatu langkah penelitian, dimana peneliti menurunkan variabel penelitian ke dalam konsep yang memuat indikator-indikator yang lebih rinci. Pokok penelitian yang dimaksud yaitu :

1. Akuntabilitas dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Transparan
 - b. Akuntabel
 - c. Partisipatif
 - d. Tertib dan disiplin anggaran
2. Perencanaan Dana Desa

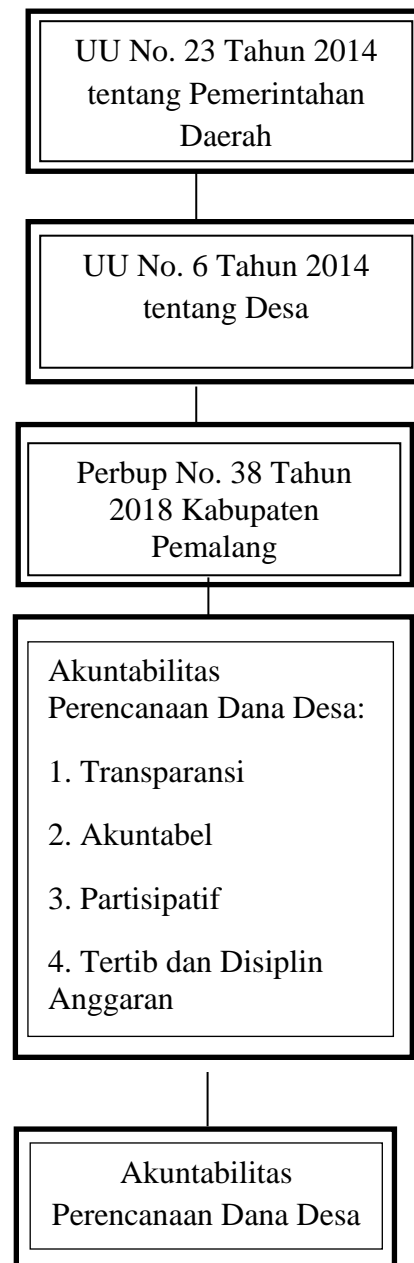
II.5 Alur Pikir

Alur pikir dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai proses yang memuat langkah-langkah atau proses urutan mengenai topik atau tema penelitian. Peranan penelitian sangat dominan dalam menentukan keberhasilan penelitian sedangkan alur pikir sifatnya hanya membantu mengarahkan proses penelitian agar berjalan dengan baik.

Alur Pikir mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Muncang, Desa Bodeh dan Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dapat digambarkan sebagai berikut :

Skema II.01

Alur Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan guna memperoleh dan mengarahkan jalannya penelitian. Dengan metode penelitian, penelitian akan lebih terarah sebab metode penelitian memberikan kemudahan dan kejelasan tentang apa dan bagaimana peneliti melakukan penelitian.

III.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif diangkat dari masalah yang masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga bersifat sementara, dalam kaitannya dengan teori, pada penelitian kualitatif bersifat menemukan teori.

Sugiyono (2006), membedakan penelitian tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, serta analisis dan jenis datanya. Menurut tingkat eksplanasinya, Sugiyono (2006) mengelompokkan tipe penelitian menjadi :

1. Penelitian Eksplorasi (Eksploratif)

Penelitian ini bersifat menjelajah, bertujuan untuk memperdalam pengetahuan suatu gejala tertentu atau mendapat ide-ide baru mengenai gejala-gejala itu dengan maksud untuk mendapatkan penemuan masalah secara lebih terperinci atau untuk mengembangkan hipotesis.

2. Penelitian Deskriptif

Penelitian ini mempunyai maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan (Moleong, 2014). Dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam hal ini penelitian mendeskripsikan secara kualitatif mengenai peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

3. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

4. Penelitian Asosiatif atau hubungan

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Dari keempat tipe penelitian diatas maka penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan tipe yang kedua, yaitu tipe penelitian deskriptif atau menggambarkan dan mendeskripsikan tentang Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa di Kecamatan Bodeh Tahun 2019.

III.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data wawancara, yaitu dengan tanya jawab secara lisan atau tatap muka, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dari responden tentang hal-hal yang berkaitan tujuan penelitian. Untuk mengetahui dari mana data diperoleh, maka perlu ditentukan sumber data yang diperoleh sebagai bahan analisa dapat dikelompokkan menjadi :

a. Data Primer

Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data menurut Sugiyono (Sugiyono 2014:193). Dalam penelitian ini data primernya adalah akuntabilitas perencanaan dana desa di Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya dimana data ini diperoleh melalui hasil wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif terhadap informan yang telah ditentukan. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi tentang perencanaan dana desa.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh melalui monografi, laporan-laporan, dokumen-dokumen dan data-data lain yang telah dipublikasikan baik dalam surat kabar maupun media massa yang lain.

III.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian informan merupakan orang yang berada dalam pada latar penelitian (Moloeng 2014:91). Informan adalah orang terlibat untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pelayan, keterangan, dapat membantu dalam memenuhi persoalan dan permasalahan.

Dalam penelitian ini bertindak sebagai narasumber berjumlah 5 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Desa Muncang dengan jumlah 3 orang.
- b. Tim Pendamping Desa dengan jumlah 1 orang.
- c. Masyarakat Desa Muncang dengan jumlah 1 orang.

III.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Apakah data yang diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data yang diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi, menurut Nasution (1998) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sugiyono, 2011:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. (Marshall, 1995:226) mengemukakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk meneliti secara langsung dilapangan tentang Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa di Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.

2. Metode Interview (Wawancara) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg, 2002:231) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik Pengumpulan data ini

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Wawancara ialah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Teknisnya adalah dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden, dengan menggunakan metode wawancara langsung dimaksudkan mempertegas hal-hal yang mungkin tidak diketahui responden. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan topik penelitian untuk memperoleh data primer dari obyek penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang akuntabilitas perencanaan dana desa.

3. Kepustakaan adalah mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang relevan untuk membantu di dalam menyelesaikan dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
4. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal dokumen (Bogdan, 240) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D mengemukakan bahwa hasil penelitian dari observasi

atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

Metode dokumentasi dapat mendukung data-data dalam penelitian agar lebih valid. Dokumentasi tersebut bisa begitu berharga sehingga penelitian bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi kasus. Foto-foto ini akan membantu memuat karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar.

III.5 Teknik Analisa Data

Menurut Matthew Miles dan Michael Huberman (1984) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Prof Sugiyono menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data ialah : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Adapun penjelasan tentang model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011) sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data adalah dimana data pertama dan masih bersifat mentah yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian.
2. Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu

dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

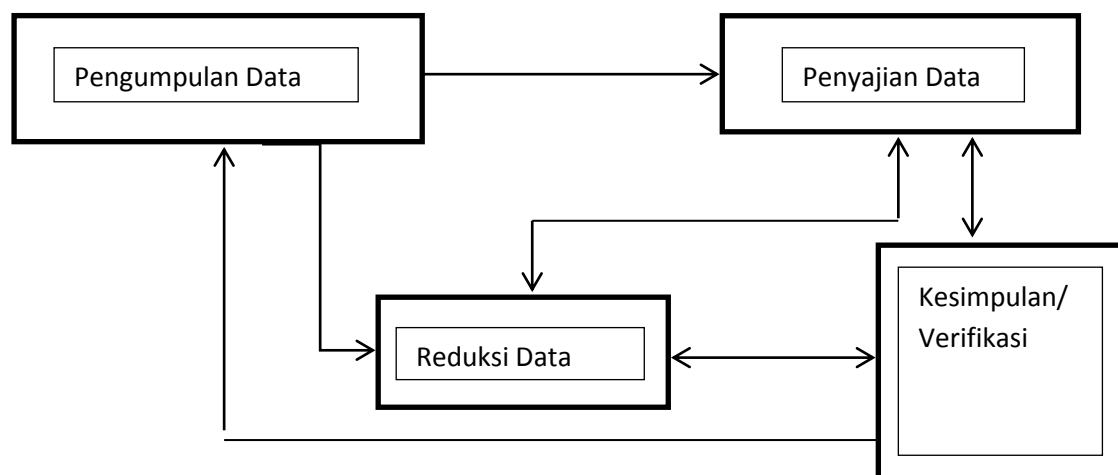
3. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Kami membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi, dari permulaan pengumpulan data seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, dan proporsisi. Menurut Miles dan Huberman (2005) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Oleh Prof Sugiyono mengemukakan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Skema analisis data menurut Miles and Huberman dikutip Mungin, Burhan (2003:56) sebagai berikut :

Skema III.01

Proses Analisis Data



Pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi berinteraksi satu sama lain, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

III.6 Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal Skripsi

- a. Halaman Skripsi**
- b. Halaman Judul**
- c. Pernyataan Penulis**
- d. Persetujuan Skripsi**
- e. Pengesahan Skripsi**
- f. Halaman Peruntukan**
- g. Abstrak**
- h. Kata Pengantar**
- i. Daftar Isi**
- j. Daftar Tabel**
- k. Daftar Gambar**
- l. Daftar Lampiran**

2. Bagian Utama Skripsi

a. BAB I Pendahuluan

- a.1. Latar Belakang
- a.2. Rumusan Masalah
- a.3. Tujuan Masalah

b. BAB II Tinjauan Pustaka

- b.1. Kerangka Teori
- b.2. Definisi Konsep

b.3. Pokok-pokok Penelitian

b.4. Alur Pikir Penelitian

c. BAB III Metode Penelitian

c.1. Jenis dan Tipe Penelitian

c.2. Jenis dan Sumber Data

c.3. Informan Penelitian

c.4. Teknik Pengumpulan Data

c.5. Teknik Analisa Data

c.6. Sistematika Penelitian

d. BAB IV Deskripsi Wilayah Penelitian

e. BAB V Hasil Penelitian

f. BAB VI Pembahasan

g. BAB Penutup

3. Bagian Akhir Skripsi

a. Daftar Rujukan

b. Tabel-tabel

c. Gambar-gambar

Lampiran-lampiran

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Deskripsi daerah penelitian merupakan gambaran secara umum tentang daerah tempat penelitian tersebut berlangsung. Uraian tentang daerah penelitian penting untuk memberi gambaran secara umum, baik mengenai potensi maupun masalah secara umum yang ada di daerah penelitian. Lokasi penelitian ini diambil pada kantor Balaidesa Muncang, Balaidesa Bodeh dan Balaidesa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

IV.1. Profil Kecamatan Bodeh

Kecamatan Bodeh adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Bodeh terdiri dari 19 desa. Kantor Kecamatan Bodeh terletak pada No 22, Jl. Raya Pendowo – Bodeh, Kabupaten Pemalang (52365) Jawa Tengah. Saat ini Kecamatan Bodeh dipimpin oleh Drs. Mubarak Ahmad, MM dengan Sekretaris Camat Umar Aziz, S.Sos.

Visi dan misi Kecamatan Bodeh mengikuti visi misi Kabupaten Pemalang.

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, sehat sejahtera, berkesadaran hukum dan demokratis dalam kesatuan wilayah Kabupaten Pemalang yang IHKLAS (Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman dan Sehat).

b. Misi

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara murah dan merata
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi
4. Meningkatkan taraf hidup penduduk miskin
5. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkesinambungan
6. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima
7. Mengupayakan perwujudan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah yang bertumpu pada kemampuan dan potensi lokal
8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi
9. Meningkatkan ketertiban dan kemandirian serta pelaksanaan sistem hukum yang menjamin tegaknya pelaksanaan supremasi hukum
10. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara harmonis dalam rangka saling menghormati dengan semangat kekeluargaan.

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang 2019)

IV.1.1 Letak Geografis

Secara Geografis, Kecamatan Bodeh merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang, terdiri dari 19 desa, 63 dusun, 80 RW dan 319 RT, dengan jumlah penduduk sebanyak 61.728 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 31.535 jiwa dan perempuan sebanyak 30.192. Dan mempunyai luas wilayah 85,98 Km² terletak pada ketinggian antara 10-15 m diatas permukaan laut dan suhu mencapai 30⁰C. Luas lahan tersebut sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Bodeh antara lain :

Sebelah Utara	: Kecamatan Comal
Sebelah Timur	: Kecamatan Pekalongan
Sebelah Selatan	: Kecamatan Watukumpul
Sebelah Barat	: Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Bantarbolang

Gambar: IV.01



(Sumber: <https://www.pemalangkab.go.id>)

Kondisi topografi wilayah Bodeh terdiri dari daerah dataran dengan ketinggian rata-rata 10-15 meter diatas permukaan laut. Pemanfaatan tanah sebagian besar untuk lahan pertanian, tanaman pangan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Namun sekarang semakin berkembangnya zaman semakin banyak bangun-bangunan yang didirikan yang digunakan untuk perumahan/gedung pekarangan, pertokoan, tempat usaha, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Tabel: IV.01

Luas Penggunaan Lahan (Ha) Menurut Jenisnya per Desa di Kecamatan Bodeh

No	Desa/Kelurahan	Sawah	Bukan Sawah	Jumlah	%
	1	2	3	4	5
1.	Lonkeyang	213,00	263,53	476,53	1
2.	Jatingarang	331,81	773,64	1.105,45	1
3.	Gunungbatu	8,470	128,550	137,398	1
4.	Pasir	141,00	438,77	579,77	3
5.	Kwasen	82,40	756,08	838,48	1
6.	Parunggalih	39,12	1.045,25	1.084,37	6
7.	Payung	41,56	302,23	343,79	2
8.	Cangak	9,325	3,855	13,185	1
9.	Jatiroyom	152,47	857,76	1.010,23	1
10.	Kebandungan	87,56	52,89	140,45	1
11.	Kesesirejo	232,76	128,87	361,63	4
12.	Babakan	129,16	56,19	185,35	2
13.	Kebandaran	42,339	35,339	84,678	1
14.	Karangbrai	369,700	74,050	443,750	5
15.	Jraganan	14,07	8,9	23,6	3
16.	Bodeh	86,98	60,417	147,397	1
17.	Muncang	160,820	140,478	301,298	3
18.	Kelangdepok	162,48	58,25	220,73	2
19.	Pendowo	148,78	107,93	256,71	3
	Jumlah	2.453,804	5.292,979	7.746,783	100

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang 2019)

Dari tabel diatas dilihat dari jumlah keseluruhan lahan yang ada di wilayah Kecamatan Bodeh yaitu 7.746,783 Ha. Dengan luas penggunaan lahan sawah paling banyak dipakai oleh masyarakat desa Karangbrai dengan jumlah 369,700 Ha dan paling sedikit dipakai oleh masyarakat desa Gunungbatu dengan jumlah 8,470 Ha. Lalu untuk luas penggunaan lahan bukan sawah paling banyak dipakai oleh masyarakat desa Parunggalih dengan jumlah 1.045,25 Ha atau setara dengan 6% sedangkan paling sedikit dipakai oleh masyarakat desa cangk dengan jumlah 3,855 Ha atau setara dengan 1%.

IV.1.2. Kondisi Demografi

Kondisi demografi merupakan suatu kondisi yang menjelaskan terkait kependudukan warga masyarakat yang ada ditempat tersebut. Dengan tujuan mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial, menjelaskan pertumbuhan masa lampau, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia, mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. Kondisi demografi ini meliputi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut kelompok umur, jumlah pendidikan, jumlah penganut agama dan jumlah penduduk menurut bermata pencaharian. Berikut ini data jumlah penduduk di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang :

Tabel : IV.02

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perDesa/Kelurahan di
Kecamatan Bodeh

No	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	(%)		(%)
					Laki-Laki	Perempuan	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Longkeyang	-	-	-	-	-	-
2.	Jatingarang	3.633	3.613	7.246	7	14	14
3.	Gunungbatu	925	891	1.816	3	3	3
4.	Pasir	1.544	1.500	3.044	6	6	6
5.	Kwasen	-	-	-	-	-	-
6.	Parunggalih	-	-	-	-	-	-
7.	Payung	-	-	-	-	-	-
8.	Cangak	1.785	1.766	3.551	7	7	7
9.	Jatiroyom	1.768	1.728	3.496	6	6	6
10.	Kebandungan	1.391	1.312	2.703	5	5	5
11.	Kesesirejo	-	-	-	-	-	-
12.	Babakan	1.397	1.372	2.769	5	5	5
13.	Kebandaran	859	830	1.689	3	3	3
14.	Karangbrai	2.594	2.475	5.069	10	9	10
15.	Jraganan	1.261	1.242	2.503	4	5	4
16.	Bodeh	874	866	1.740	3	3	3
17.	Muncang	2.810	2.769	5.579	11	11	11
18.	Kelangdepok	1.920	1.882	3.802	7	7	7
19.	Pendowo	2.559	2.525	5.084	10	10	10
	Jumlah	25.320	24.771	50.091			100
	%	50,54	49,45				

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang 2019)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Bodeh menurut jenis kelamin per desa pada tahun 2019 berjumlah 50.091 jiwa. Terdiri dari laki-laki berjumlah 25.320 jiwa atau setara dengan 50,54% dan perempuan berjumlah 24.771 jiwa atau setara dengan 49,45%. Dengan masyarakat terbanyak terdapat di desa Jatingarang

berjumlah 7.246 jiwa atau setara dengan 14% dan sedikit di desa Kebandaran berjumlah 1.689 jiwa atau setara dengan 3%.

Tabel : IV.03

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok dan Umur per Desa/Kelurahan di

Kecamatan Bodeh Tahun 2019

No	Desa/Kelurahan	Penduduk Menurut Usia							Jumlah	(%)
		0-6	7-12	13-18	19-24	25-55	56-79	80 +		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Longkeyang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Jatingarang	780	528	534	702	3.236	1.402	84	7.246	14
3.	Gunungbatu	170	255	620	410	125	200	36	1.816	3
4.	Pasir	347	295	328	395	1.368	299	12	3.044	6
5.	Kwasen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Parunggalih	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Payung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Cangak	387	348	376	415	1.661	319	45	3.551	7
9.	Jatiroyom	367	394	340	430	1.510	420	35	3.496	6
10.	Kebandungan	294	214	213	256	1.281	419	26	2.703	5
11.	Kesesirejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Babakan	336	525	407	528	533	285	155	2.769	5
13.	Kebandaran	170	167	136	186	723	265	42	1.689	3
14.	Karangbrai	593	685	853	985	967	735	251	5.069	10
15.	Jraganan	271	319	410	493	591	425	13	2.503	4
16.	Bodeh	275	331	245	450	135	284	20	1.740	3
17.	Muncang	830	834	822	818	826	809	757	5.696	11
18.	Kelangdepok	346	354	282	311	1.973	520	16	3.802	7
19.	Pendowo	502	354	475	653	1.976	1.101	23	5.084	10
	Jumlah								50.208	100

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang 2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, penduduk paling banyak di wilayah Kecamatan Bodeh pada tahun 2019 terletak pada usia 25-55 dengan jumlah keseluruhan 3.236 jiwa. Dan yang paling banyak ada di desa Jatingarang

berjumlah 7.246 jiwa atau setara dengan 14% dan yang paling sedikit ada di desa Kebandaran berjumlah 1.689 jiwa atau setara dengan 3%.

Tabel : IV.04

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan

Bodeh Tahun 2019

No	Desa	TK	SD/MI	SLTP/MTS	SLTA/SMA	Jumlah	(%)
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Longkeyang	0	2	1	0	2	5
2.	Jatingarang	0	4	0	0	4	10
3.	Gunungbatu	0	1	0	0	1	2,5
4.	Pasir	0	2	0	0	2	5
5.	Kwasen	0	1	0	0	1	2,5
6.	Parunggalih	0	2	1	0	3	7,5
7.	Payung	0	1	1	0	2	5
8.	Cangak	0	2	0	0	2	5
9.	Jatirojom	0	2	0	0	2	5
10.	Kebandungan	0	1	0	0	1	2,5
11.	Kesesirejo	0	3	0	0	3	7,5
12.	Babakan	0	1	0	1	2	5
13.	Kebandaran	0	4	1	0	5	12,5
14.	Karangbrai	1	1	0	0	2	5
15.	Jraganan	0	1	0	0	1	2,5
16.	Bodeh	0	0	0	0	0	0
17.	Muncang	0	3	0	0	3	7,5
18.	Kelangdepok	0	2	1	0	3	7,5
19.	Pendowo	0	2	0	0	2	5
	Jumlah					40	100

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang 2019)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Bodeh menurut tingkat pendidikan per desa pada tahun 2019 berjumlah 40. Dengan sarana pendidikan yang terbanyak adalah di desa Kebandaran berjumlah 5 atau setara dengan 12,5% dan yang paling sedikit

di desa Gunungbatu, Kwasen, Kebandungan dan Jraganan berjumlah 1 atau setara dengan 2,5%.

Tabel : IV.05

Mata Pencaharian Penduduk Menurut Jenisnya per Desa di Kecamatan

Bodeh Tahun 2019

No	Desa	Mata Pencaharian							
		Petani	Pedagang	Pengangkutan	Buruh Industri	Buruh Bangunan	PNS	Pensiunan	Lain2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Longkeyang	1.366	92	11	63	78	10	8	0
2.	Jatingarang	2.026	309	28	60	36	27	22	636
3.	Gunungbatu	725	23	10	14	57	10	4	6
4.	Pasir	1.254	45	12	0	156	3	0	0
5.	Kwasen	315	12	18	12	51	2	1	0
6.	Parunggalih	890	245	21	0	0	0	0	0
7.	Payung	225	16	19	0	0	0	0	0
8.	Cangak	119	819	29	57	223	10	5	698
9.	Jatiroyom	465	33	122	0	125	15	11	1.214
10.	Kebandungan	598	530	5	0	405	20	6	183
11.	Kesesirejo	1.297	62	17	0	0	0	0	0
12.	Babakan	671	26	8	56	105	22	5	497
13.	Kebandaran	582	47	5	0	105	18	16	610
14.	Karangbrai	983	498	15	131	359	22	4	1.142
15.	Jraganan	1.214	42	5	258	148	13	5	714
16.	Bodeh	287	287	6	0	169	3	1	0
17.	Muncang	642	130	11	320	240	4	78	578
18.	Kelangdepok	545	68	12	13	106	0	26	269
19.	Pendowo	1.808	622	49	420	684	3	25	2.653
	Jumlah	16.012	3.906	403	1.404	3.047	182	217	9.200
	%	46,58	11,36	1,17	4,08	8,86	0,52	0,63	26,76

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaen Pemalang 2019)

Bisa dilihat pada tabel diatas bahwa wilayah Kecamatan Bodeh memiliki beragam mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan melihat tabel diatas yang paling banyak yaitu

masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah 16.012 orang atau setara dengan 46,58%. Disamping itu sektor pertanian juga telah menjadi produk unggulan bagi sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Bodeh. Dan mata pencaharian yang paling sedikit yaitu PNS yang hanya berjumlah 182 orang atau setara dengan 0,52% .

Tabel : IV.06

Jumlah Penganut Agama per Desa di Kecamatan Bodeh Tahun 2019

No	Desa	Penganut Agama					Jumlah
		Islam	Protestan	Katholik	Hindhu	Budha	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Longkeyang	3.741	-	-	-	-	3.741
2.	Jatingarang	7.321	-	2	-	-	7.323
3.	Gunungbatu	1.816	-	-	-	-	1.816
4.	Pasir	3.044	-	-	-	-	3.044
5.	Kwasen	785	-	-	-	-	785
6.	Parunggalih	-	-	-	-	-	-
7.	Payung	-	-	-	-	-	-
8.	Cagak	3.538	-	4	-	-	3.542
9.	Jatiroyom	3.461	6	5	-	-	3.472
10.	Kebandungan	2.703	-	-	-	-	2.703
11.	Kesesirejo	-	-	-	-	-	-
12.	Babakan	2.767	2	-	-	-	2.769
13.	Kebandaran	1.691	-	-	-	-	1.691
14.	Karangbrai	5.084	-	-	-	-	5.084
15.	Jraganan	2.502	-	-	-	-	2.502
16.	Bodeh	-	-	-	-	-	-
17.	Muncang	5.762	19	8	-	-	5.789
18.	Kelangdepok	3.802	-	-	-	-	3.802
19.	Pendowo	5.075	-	9	-	-	5.084
	Jumlah	53,092	27	28	-	-	53.147
	%	99,89	0,05	0,05	0	0	100

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaen Pemalang 2019)

Dengan melihat tabel pada data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Bodeh sebagian besar menganut agama islam

dengan jumlah keseluruhan mencapai 53.092 orang atau setara dengan 99,89%. Dan jumlah paling sedikit yaitu masyarakat yang menganut pada agama protestan dengan jumlah 27 orang atau setara dengan 0,05%.

Sehingga dapat dikatakan mayoritas masyarakatnya memiliki jiwa religius yang lumayan kental yang melekat pada setiap diri masyarakat. Dan membuat hubungan antar masyarakatnya menjadi lebih rukun dan akur antara masyarakat satu dengan yang lain, walaupun terkadang masih ada sedikit perselisihan.

IV.1.3. Kondisi Pemerintahan

Kecamatan adalah wilayah administratif yang berada di bawah Kabupaten atau Kota. Suatu kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dia juga dibantu oleh perangkat lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 menjelaskan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Dengan demikian seorang camat memiliki kedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah atau bisa dikatakan bahwa organisasi Kecamatan berfungsi serta bertanggungjawab untuk membantu tugas-tugas Bupati dalam mengoptimalkan berbagai kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan yang berada di lingkup wilayah Kecamatan.

Dalam organisasi Kecamatan juga memiliki gambar struktur mengenai bagian-bagian Kecamatan yang bisa dilihat di gambar struktur agar mudah untuk

di ingat dan agar mudah masyarakat mengerti berbagai bagian yang ada dalam tata Kecamatan, sehingga mampu memberikan informasi bagi masyarakat itu sendiri.

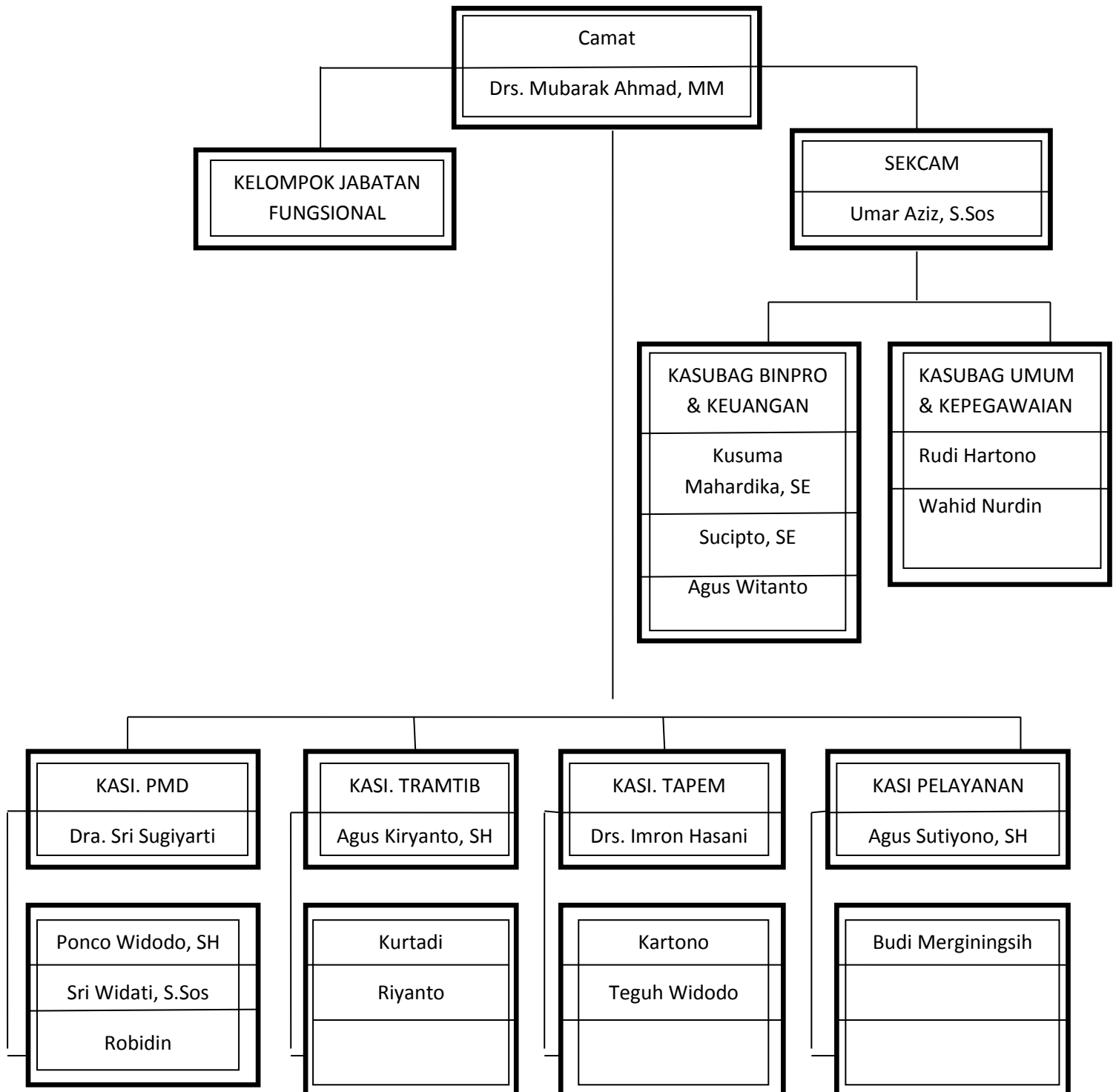
Struktur organisasi juga penting bagi para aparatur, karena dengan adanya tatanan jabatan/kedudukan diharapkan menambah semangat para aparatur dalam bekerja dan mengabdikan dirinya kepada Negara dan masyarakat.

Struktur Organisasi (STO) dalam sebuah organisasi juga di maksudkan untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi yang terbagi dalam unit-unit bagian divisi agar meminimalisir terjadinya masalah dalam setiap unit atau divisi. Dalam struktur organisasi juga terdapat span of control (rentang pengendalian) para pimpinan unit untuk memperjelas jumlah unit yang akan di bawahi.

Pentingnya Struktur Organisasi juga untuk mengatur hubungan yang baik antar unit atau masing-masing bidang. Serta dapat mempermudah aparatur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Skema : IV.01

Struktur Kecamatan Bodeh



(Sumber: Data Kecamatan Bodeh Tahun 2019)

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat adalah perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat dalam kerja kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penerapan, penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah desa;
6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.

Uraian tugas dari masing-masing pejabat struktural di lingkungan Kecamatan Bodeh sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
2. Mengelola rencana dan program kerja Kecamatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
3. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di wilayah Kecamatan;

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariat;
2. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Kecamatan;
3. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Kasubag Umum dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
2. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Kasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas kepegawaian;
2. Menyusun rencana dan program kerja kasubag kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

Kasi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas dalam memberdayakan masyarakat desa;
2. Menyiapkan rencana dan program kerja kasi pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan.

Kasi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan;
2. Menyiapkan rencana dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan.

Kasi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas dalam urusan Pemerintahan Kecamatan pembinaan pemerintahan desa dan Kelurahan;
2. Menyiapkan rencana dan program kerja seksi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan.

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas dalam tugas pendapatan dan pelayanan umum tingkat Kecamatan;
2. Menyiapkan rencana dan program kerja pelayanan umum sebagai pedoman pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan.

IV.1.4. Kondisi Sosial Ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mengamati adanya perbedaan kondisi antarwarga baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas perbedaan mencakup berbagai aspek kehidupan, misalnya ada orang kaya dan orang miskin, ada orang yang berkuasa dan ada orang yang tidak berkuasa.

Kondisi yang cenderung merujuk pada keadaan ekonomi dan sosial seseorang dalam kaitannya dengan jabatan (kekuasaan) dan peranan yang dimiliki oleh orang bersangkutan di dalam masyarakat. Status dan kondisi cenderung memperlihatkan tingkat kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain berdasarkan suatu ukuran tertentu. Ukuran atau tolak ukur yang dipakai didasarkan pada salah satu kombinasi yang mencakup tingkat pendidikan, prestasi atau kekuasaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kondisi merupakan keadaan atau kedudukan seseorang. Sedangkan sosial merupakan sesuatu hubungan dengan masyarakat. Ekonomi merupakan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi merupakan keadaan, kedudukan atau posisi seseorang di dalam masyarakat yang ditinjau dari segi sosial dan ekonomi.

Dengan memperhatikan keragaman yang dimiliki maka mobilitas perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Bodeh dapat dikatakan sangat jauh untuk dikatakan “miskin harta” secara kasat mata dapat dilihat rumah-rumah yang dihuni masyarakat umumnya berada pada kondisi yang prima dan layak pakai. Suburnya tanah menjadi motivasi utama bagi tumbuh suburnya usaha agribisnis. Wilayah kecamatan bodeh saat ini telah menjadi sasaran penting bagi pelaku usaha cabai, buah timun suri, mentimun, semangka dan lain-lain untuk bisa bercocok tanam di daerah tersebut.

Tabel : IV.07

Sarana Prasarana dalam menunjang perekonomian di Kecamatan Bodeh

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
	1	2	3
1.	Pasar Tradisional	3	Baik
2.	Bank Rakyat	2	Baik
3.	Kantor Pos	1	Baik
4.	SPBU	1	Baik
5.	Toko/Kios	367	Baik
6.	Alfamart	1	Baik
7.	Indomart	1	Baik
	Jumlah	376	

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang 2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa sarana prasarana dalam menunjang perekonomian di Kecamatan Bodeh terbilang baik.

IV.1.5. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat disekitar Kecamatan Bodeh merupakan pendukung kebudayaan Jawa. Sebagaimana seperti masyarakat pendukung kebudayaan Jawa lainnya mereka dalam berkomunikasi juga menggunakan bahasa jawa. Akan tetapi, dengan dialog “Jawa Pemalangan” yang termasuk dalam kategori dialog “Banyumasan”. Dialognya yang khas menjadikan orang Pemalang sering disebut sebagai “Wong Ngapak” karena jika mengucapkan kata-kata tertentu, “bapak” misalnya maka pengucapan huruf “k”-nya sangat kental (ketara). Hal ini berbeda dengan orang Jawa-Yogya dan Jawa-Solo yang pengucapan huruf “k”-nya nyaris tak terdengar.

Oleh karena itu masyarakat Pemalang khususnya disekitar Kecamatan Bodeh menyebut bahasa jawa yang diucapkan oleh orang Yogya dan Solo adalah bandek, yaitu suatu istilah untuk bahasa yang halus.

Ada satu hal yang perlu dicatat berkenaan dengan bandek karena ternyata di beberapa Kecamatan yang tergabung dalam Kabupaten Pemalang, yaitu Bodeh, Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami masyarakatnya menggunakan bandek pekalongan dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Ini artinya masyarakat yang ada di Kecamatan Bodeh dalam berkomunikasi menggunakan bandek. Dengan perkataan lain, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Pemalang sebagian menggunakan dialog jawa-ngapak (masyarakat Kecamatan: Moga, Pemalang, dan Taman) dan sebagian jawa bandek (Bodeh, Petarukan, Ampelgading, Comal dan Ulujami).

Prinsip keturunan yang dianut oleh masyarakat Pemalang adalah bilateral, yaitu suatu sistem penarikan garis keturunan melalui nenek moyang laki-laki dan wanita secara serentak. Artinya yang dianggap sebagai kerabatnya ialah kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sedangkan istilah yang digunakan untuk menyebut atau menyapa kerabatnya antara lain: bapak (istilah untuk menyebut orang tua laki-laki), side lanang (istilah yang digunakan untuk menyebut orang tua laki-laki ayah dan ibu), side wadon (istilah yang digunakan untuk menyebut orang tua perempuan ayah dan ibu), lek atau paman (istilah yang digunakan untuk menyebut adik laki-laki ayah dan ibu), bibi (istilah yang digunakan untuk menyebut adik perempuan ayah dan ibu), kakang (istilah yang

digunakan untuk menyebut saudara tua laki-laki), mbakyu (istilah yang digunakan untuk menyebut saudara tua perempuan), dan adi (istilah yang digunakan untuk menyebut saudara muda laki-laki maupun perempuan).

Pada sistem perkawinan yang mereka anut adalah “bebas” artinya, tidak hanya membatasi pada daerah sendiri (indogami-daerah) tetapi juga membolehkan orang kawin dengan gadis atau jejaka dari daerah lain. Sedangkan tempat tinggal yang dianut setelah perkawinan adalah matriloal (pengantin baru tinggal di rumah orang tua atau dekat dengan kerabat pihak perempuan).

Pada masa lalu orang-orang yang status sosialnya tinggi adalah memiliki harta benda yang berlimbah dan orang-orang yang pengetahuan agamanya (islam) dalam/luas. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dimasa lalu banyak orang tua yang mengirim anaknya ke pesantren seperti: Kaliwungu (Semarang), Krapyak (Yogyakarta), dan Lasem (Jawa Timur). Namun dewasa ini yang termasuk dalam status sosial tinggi ialah tidak hanya orang-orang yang memiliki kekayaan dan pengetahuan agama saja, tetapi juga pendidikan formal yang tinggi. Ini artinya, orang-orang yang hanya memiliki kekayaan, pengetahuan agama, dan pendidikan formal yang sedang-sedang saja termasuk dalam status sosial sedang (menengah). Sedangkan mereka yang tidak mau atau kurang mampu, baik dalam kekayaan, pengetahuan agama, dan pendidikan formal termasuk dalam status sosial yang rendah seperti: tukang songgol, tukang becak, dan buruh tani (pepeng).

Banyaknya lembaga keagamaan di wilayah Kecamatan Bodeh dapat dijadikan parameter awal, bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Bodeh bersifat religius, santun dalam kata-kata dan bijak. Arus informasi sebagai dampak era globalisasi terbukti telah berhasil mendorong pada peningkatan kecerdasan masyarakat dari penindasan politis serta berhasil menyeluruh rasa keinginan tahanan yang tinggi.

Terdapat indikasi yang kuat bahwa tokoh masyarakat telah memiliki wawasan mandiri tentang suatu tema yang sedang menjadi topik kajian masyarakat. Para tokoh masyarakat sangat menghargai kepada upaya-upaya inovatif bagi perkembangan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang islami. Kemudian mengenai kebudayaan maupun kesenian di wilayah Kecamatan Bodeh memiliki kebudayaan yang sampai sekarang ini masih dilestarikan di antaranya yaitu :

1. Kuda Lumping, pelatihan seni budaya tradisional tidak hanya menampilkan seni bela diri kuntulan saja, namun juga adanya penampilan kesenian kuda lumping. Kuda lumping ini dimainkan oleh orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah tim kuda lumping terdapat berbagai macam bagian pekerjaan yang harus dilakukan pemainnya. Misalnya pemain alat musik, penyair, pemain kuda lumping, pemain barong, serta pemain yang mengenakan riasan. Kesenian kuda lumping ini juga diiringi musik tradisional dengan syair bahasa jawa kuno serta sholawat ataupun doa-doa. Jaran kepang atau kuda lumping merupakan jenis kesenian tradisional yang umumnya dikenal di

masyarakat Jawa Tengah. Kesenian ini adalah jenis permainan yang menyertakan unsur magis karena pada adegan tertentu pemainnya memainkan atraksi yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa seperti adegan makan pecahan kaca. Dari sejumlah kesenian jaran kepeng yang ada di Jawa Tengah, Pemalang mungkin memiliki beberapa kelebihan berupa inovasi seperti adanya adegan cukup unik dimana dua atau tiga orang pemain dijadikan manusia setengah robot yang bisa duduk atau berdiri mematung berjam-jam lamanya. Kesenian jaran kepeng biasanya dipentaskan pada acara hajatan, upacara hari besar nasional atau pun menyambut kunjungan tamu resmi.

Kesenian ini juga dilengkapi dengan debus, dimana pemainnya tahan apabila terkena api ataupun benda-benda yang membahayakan. Pada saat ditengah-tengah acara terdapat beberapa pemain yang kerasukan dan dapat disadarkan sesegera mungkin. Kegiatan pelatihan seni budaya tradisional ini rutin dilakukan di Desa Kesesirejo setidaknya setahun sekali.

2. Kuntulan, kesenian ini mulai dikenal masyarakat Pemalang pada sekitar awal abad 20 yaitu pada saat di tanah air banyak muncul pergerakan kebangsaan. Tokoh-tokoh masyarakat Pemalang saat itu tak mau ketinggalan ikut dalam kancah perjuangan nasional. Dibentuklah perkumpulan bela diri, khususnya pencak silat kegiatan bela diri ini ketika itu selalu diiringi rebana dan pukulan bedug serta dikumandangkan pula doa-doa sholawat Nabi sehingga terkesan sebagai kegiatan kesenian dan keagamaan.

Setelah kemerdekaan kegiatan ini yang kemudian dikenalkan dengan nama kuntulan tetap berlangsung dan berubah dari alat perjuangan menjadi seni hiburan. Kesenian ini biasanya dipentaskan pada acara peringatan hari besar nasional, hajatan atau pun menyambut tamu resmi. Kesenian kuntulan tampak menarik karena memadukan jurus-jurus bela diri yang nampak akrobatik dan keindahan musik rebana dan bedug.

Kuntulan adalah salah satu kesenian tradisional Desa Kesesirejo yang terfokus dalam bela diri. Kuntulan ini dapat dimainkan oleh anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar maupun orang-orang yang telah dewasa. Seni bela diri ini dimainkan apabila terdapat acara tertentu, misalnya acara pagelaran seni, peringatan-peringatan di desa dan lain sebagainya. Kuntulan ini sangat mirip dengan pencak silat namun disetiap gerakannya diiringi oleh alunan musik, sholawat atau bahkan doa-doa. Pada saat latihan yang dilakukan di Balai Desa Kesesirejo pada tanggal 16 Februari 2019 pemain kuntulan berseragam memakai pakaian putih serta dilengkapi dengan peci yang juga berwarna putih.

Pelatihan Seni Budaya Tradisional yang dilakukan di Balai Desa ini bertujuan untuk tetap melestarikan budaya khas daerahnya kepada masyarakat terutama generasi muda yang mulai berkurang ketertarikannya terhadap hal-hal yang berbau tradisional. Antusiasme warga Desa Kesesirejo terlihat pada saat sebelum acara dimulai masyarakat datang berbondong-bondong ke Balai Desa untuk menyaksikan kesenian kuntulan.

IV.1.6. Kondisi Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Untuk itu disuatu Kecamatan harus memiliki sarana dan prasarana seperti puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik.

Puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain puskesmas mempunyai wewenang dan tanggungjawab atau pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Tabel : IV.08

Banyaknya Sarana Kesehatan di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

Tahun 2019

No	Desa/Kelurahan	Puskesmas	Pukes. Pemb	Klinik	Jumlah
	1	2	3	4	5
1.	Longkeyang	-	-	-	-
2.	Jatingarang	1	1	1	3
3.	Gunungbatu	1	-	-	1
4.	Pasir	-	-	-	-
5.	Kwasen	-	-	-	-
6.	Parunggalih	-	-	-	-
7.	Payung	-	-	-	-
8.	Cangak	-	-	-	-
9.	Jatiroyom	1	-	1	2
10.	Kebandungan	-	-	-	-
11.	Kesesirejo	-	1	1	2
12.	Babakan	-	-	-	-
13.	Kebandaran	1	-	2	3
14.	Karangbrai	-	-	-	-
15.	Jraganan	-	-	-	-
16.	Bodeh	-	-	-	-
17.	Muncang	1	1	-	2
18.	Kelangdepok	-	-	1	1
19.	Pendowo	-	-	-	-
	Jumlah	5	4	6	15

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang 2019)

Tabel diatas menunjukkan data banyaknya sarana kesehatan di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tahun 2019 yang keseluruhan berjumlah 5 puskesmas, 4 puskesmas pembantu dan 6 klinik. Dengan sarana kesehatan terbanyak dimiliki oleh 2 (dua) desa yaitu desa Jatingarang dan desa Kebandaran dengan jumlah 3 sarana atau setara dengan 33,33%.

IV.1.7. Kondisi Sarana dan Prasarana di Kecamatan Bodeh

Sarana dan Prasarana penunjang yang terdapat di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

Tabel : IV.09

Sarana yang terdapat di Kecamatan Bodeh

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Meja	35	Baik
2.	Meja Ketik	5	Kurang baik
3.	Kursi (aparap dan pelayanan)	40	Baik
4.	Almari arsip (dokumen)	5	Baik
5.	Komputer dan Printer	10	Baik
6.	Mesin fax/modern	3	Kurang Baik (terbatas)
7.	Kendaraan Dinas	3	Kurang Baik
8.	Papan tulis	3	Baik
9.	Papan Data/Monografi	2	Baik
10.	Brankas	2	Baik
11.	Telepon Kantor	3	Baik
12.	Kipas Angin/AC	4	Kurang Baik (terbatas)
13.	Televisi	2	Baik

(Sumber: Data Monografi Kecamatan Bodeh 2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan sarana yang ada di Kantor Kecamatan Bodeh sudah memadai namun dari beberapa ada yang kondisinya kurang baik seperti meja ketik, kendaraan dinas dan AC.

Tabel : IV.10

Prasarana yang terdapat di Kecamatan Bodeh

No	Uraian	Jumlah	Keberadaan	Kondisi
1.	Gedung Kantor	2	Ada	Kurang baik (sempit)
2.	Ruangan Kerja	6	Ada	Kurang baik (sempit)
3.	Pendopo/Tempat Rapat	1	Ada	Baik
4.	Masjid	1	Ada	Baik
5.	Puskesmas	2	Ada	Baik
6.	Penerangan Tempat	10	Ada	Baik
7.	Lahan Parkir	1	Ada	Baik

(Sumber: Data Monografi Kecamatan Bodeh 2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Bodeh sudah baik serta memadai namun beberapa ada yang kondisinya kurang baik seperti gedung kantor dan tempat kerja.

IV.2. Profil Desa Muncang

Desa Muncang adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Desa Muncang terdiri dari 4 dusun, 4 RW, dan 36 RT, dengan jumlah penduduk sebanyak 5.696 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.810 jiwa dan perempuan sebanyak 2.886 jiwa. Dan mempunyai luas wilayah 301,298 Ha terletak pada ketinggian 15 m diatas permukaan laut. Luas lahan tersebut sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian.

Berikut visi dan misi Desa Muncang :

a. Visi

Terwujudnya Desa Muncang Yang Mandiri, Inovatif Dan Berbasis Teknologi Informasi.

b. Misi

1. Pengembangan usaha mikro kecil menengah berbasis potensi desa.
2. Peningkatan akses kelembagaan ekonomi lokal untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat.
3. Membangun lembaga pengelola dan pengembang ekonomi desa.
4. Membangun organisasi usaha ekonomi desa dengan pelibatan kelembagaan kemasyarakatan desa.
5. Pengembangan ekonomi kelompok yang mandiri dan berkembang berbasis teknologi.
6. Pengembangan kerjasama dengan akademis, investor dan dunia usaha lainnya.
7. Menciptakan produk unggulan desa yang kreatif, inovatif dan berdaya saing.
8. Membuat regulasi desa sebagai jaminan keberlanjutan kegiatan usaha ekonomi.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana desa penunjang perekonomian masyarakat berbasis teknologi dan informasi.
10. Mewujudkan masyarakat desa yang kreatif dan inovatif guna menghadapi globalisasi melalui teknologi dan informasi.
11. Pembinaan umat dibidang religius untuk mencapai peningkatan keimanan dan ketahanan masyarakat melalui teknologi informasi.

12. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada bidang penguasaan teknologi dan informasi.

13. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima, cepat dan berbasis teknologi dan informasi. (Sumber: RPJMDesa Muncang).

Adapun batas-batas wilayah dari Desa Muncang antara lain :

Sebelah Utara	: Desa Kelangdepok
Sebelah Selatan	: Desa Bodeh
Sebelah Timur	: Desa Mrican, Ketanon, dan Krasak
Sebelah Barat	: Sungai Comal

Gambar IV.02



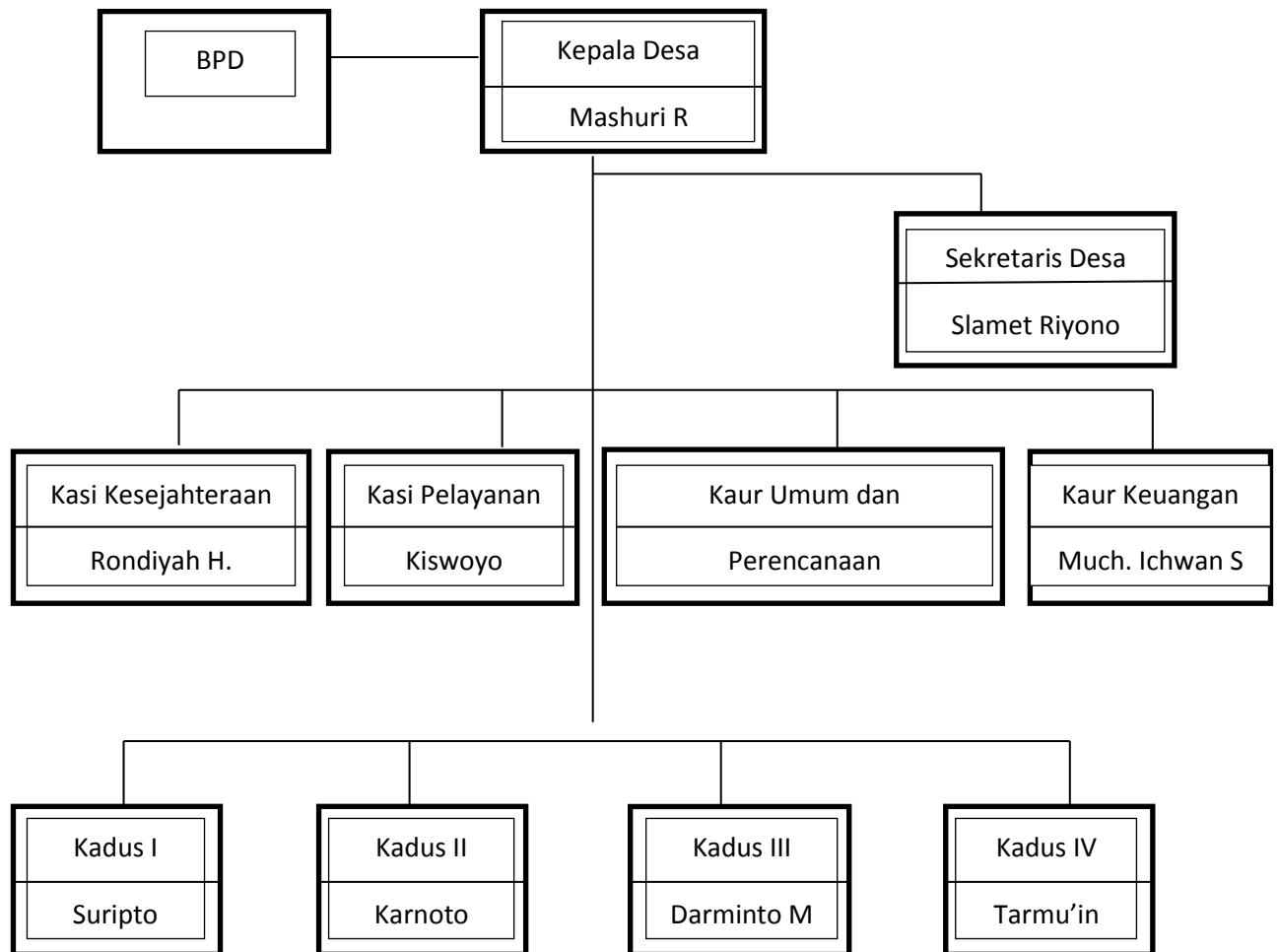
(Sumber: <https://muncang.desakupemalang.id>)

IV.2.1 Kondisi Pemerintahan

Desa merupakan pembangian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Muncang merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Bodeh, dan mempunyai wilayah yang luas dari 18 desa yang ada di Kecamatan Bodeh. Desa Muncang mempunyai 4 dusun dan 36 RT, 4 RW. Dari pemerintah Desa Muncang mempunyai 2 kasi yaitu ada kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan sedangkan 2 kaur yaitu ada perencanaan dan umum dan kaur keuangan.

Dalam organisasi Desa juga memiliki gambar struktur mengenai bagian-bagian desa yang bisa di lihat di gambar struktur agar mudah untuk di ingat dan agar masyarakat mengerti berbagai bagian yang ada dalam tata Desa, sehingga mampu memberikan informasi masyarakat itu sendiri. Struktur organisasi juga penting bagi para perangkat, karena dengan adanya tatanan jabatan/kedudukan diharapkan menambah semangat para perangkat dalam bekerja dan mengabdikan dirinya kepada negara dan masyarakat. Pentingnya struktur organisasi juga untuk mengatur hubungan yang baik antar unit atau masing-masing bidang. Serta dapat mempermudah perangkat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Skema : IV.02**Struktur Pemerintahan Desa Muncang**

(Sumber: RPJMDesa Muncang)

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa merupakan perangkat desa sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja dilingkup desa, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Desa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat untuk

menangani dilingkup desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam keajaiban desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Desa mempunyai fungsi :

1. Desa adalah pemasok terhadap kebutuhan di kota atau yang disebut dengan hinterland;
2. Desa adalah sumber tenaga kasar untuk perkotaan;
3. Desa adalah mitra atau rekan bagi pembangunan kota;
4. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. (sumber: www.seputarpengetahuan.co.id diakses tanggal 6 Desember 2019)

Uraian tugas dari masing-masing pejabat struktural di lingkungan Balaidesa Muncang adalah sebagai berikut :

Kepala Desa, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
2. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

BPD, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membahas rancangan Peraturan Desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Sektetaris Desa, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Kasi Kesejahteraan, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa;
2. Menangani pembangunan bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Kasi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyuluhan serta motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban seluruh masyarakat;
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidangnya.

Kaur Umum dan Perencanaan, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa;
2. Menyusun RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa);
3. Mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Kaur Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa;
2. Pengelolaan administrasi keuangan Desa;

3. Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Kepala Dusun (KADUS), mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;
2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
3. Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya.

IV.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana di Desa Muncang

Sarana dan Prasarana penunjang yang terdapat di Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

Tabel : IV.11

Sarana yang terdapat di Desa Muncang

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Meja kerja	7	Baik
2.	Kursi kerja	7	Baik
3.	Meja kursi tamu	2	Baik
4.	Lemari/kardek	4	Baik
5.	Komputer dan Printer	2	Kurang Baik
6.	Telepon kantor	1	Baik
7.	Ac	1	Kurang Baik
8.	Kendaraan dinas roda 2	2	Baik
9.	Kendaraan dinas roda 4	0	Kurang Baik

(Sumber: Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Muncang)

Tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan sarana yang ada di Kantor Balaidesa Muncang sudah memadai namun dari beberapa ada yang kondisinya kurang baik seperti komputer, Ac dan kendaraan dinas roda 4.

Tabel : IV.12

Prasarana yang terdapat di Desa Muncang

No	Uraian	Jumlah	Keberadaan	Kondisi
1.	Gedung kantor	1	Ada	Baik
2.	Balai pertemuan	1	Ada	Baik
3.	Ruangan Kerja	2	Ada	Baik
4.	Lahan Parkir	1	Ada	Baik

(Sumber: Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Muncang)

Tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan prasarana yang di Kantor Balaidesa Muncang sudah baik serta memadai.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa Di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019 (studi kasus di Desa Muncang). Peneliti memilih informan tidak pada besaran tetapi kedalaman informasi yang didapatkan dengan memilih orang-orang yang mengetahui bagaimana permasalahan yang ada dalam penelitian, hal ini agar tingkat kepercayaan dan validitas dari peneliti ini memiliki kepercayaan bagi para pembaca.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan dana desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui apa saja akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang ada di Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Pokok-pokok penelitian mengenai Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas dalam dana desa dengan unit analisis :

- a. Transparansi: Semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi.
- b. Akuntabel: Bahwa setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan dipertanggungjawabkan.

- c. Partisipatif: Setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
- d. Tertib dan Disiplin Anggaran: Didalam anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan dan penggunaan sesuai anggaran di desa.

2. Perencanaan Dana Desa: Kegiatan untuk memperkirakan pendapat belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Untuk mengetahui apa saja yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui apa saja akuntabilitas perencanaan dana desa serta faktor penghambat dan solusinya seperti apa dari akuntabilitas perencanaan dana desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Adapun informan mencakup :

- a. Desa Muncang terdiri dari :
 - 1. Bapak Mashuri Kepala Desa Muncang
 - 2. Bapak Slamet Riyono Sekretaris Desa Muncang
 - 3. Bapak Ichwan Bendahara Desa Muncang
- b. Pendamping Desa
 - 1. Bapak Joko Kecamatan Bodeh
- c. Tokoh Masyarakat terdiri dari :

1. Bapak Hamid Desa Muncang

V.1. Hasil Penelitian

1. Akuntabilitas Dana Desa dengan unit analisis :

a. Transparansi

Semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi.

1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dana desa :

Peran pemerintah desa dalam keterbukaan tentang dana desa yaitu dengan kita mengadakan musrenbangdes setelah itu kita sampaikan informasi mengenai dana desa hanya saja di desa muncang belum terpasang papan informasi tentang dana desa jadi belum terbuka dengan masyarakat muncang hanya lingkup dekat balaidesa.

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Dalam mendukung program yang didanai dana desa disamping menyampaikan informasi secara grafis dan disitu tertuang dalam APBDes.

Selanjutnya jawaban Bapak Slamet Riyono selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Dalam rangka mendukung program yang didanai dari dana desa berarti disamping menyampaikan informasi secara grafis itu tertuang pada APBDes hanya saja disini belum ada papan informasi mengenai dana desa.

Adapun jawaban Bapak Ichwan selaku (Bendahara Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Didalam mendukung keterbukaan pelaksanaan program kita sudah menyampaikan di dalam musrenbang. Disini juga belum pasang papan informasi mengenai dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa dalam transparansi perencanaan dana desa kurang mendukung keterbukaan informasi terhadap masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik dengan cara melaksanakan musrenbangdes tetapi belum ada papan informasi tentang dana desa.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah prinsip tranparansi ada 3 salah satunya ada informasi kebijakan apakah pemerintah desa sudah melaksanakan kebijakan desa sesuai aturan :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Iya sudah sesuai aturan.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Iya sudah sesuai aturan, bahwa penggunaan dana desa kita seharusnya memberikan semacam banner untuk penggunaan kemudian papan informasi kegiatan tetapi kita belum melaksanakannya.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Sudah dilaksanakan semua sesuai dengan pedoman dari kementerian pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa pada prinsip transparansi salah satunya tentang informasi kebijakan sudah melaksanakan kebijakan desa sesuai aturan desa.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apa saja yang dihasilkan dari kegiatan desa yang di danai dana desa :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Hasil kegiatan desa yaitu pengaspalan jalan kemudian pembangunan drainase, pembangunan talud dan pembangunan beton. Untuk pemberdayaan ada pelatihan untuk pemuda.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Hasil dari kegiatan desa ada pengaspalan jalan, pembangunan drainase, pembangunan talud, dan pembangunan beton. Untuk pemberdayaan juga ada pelatihan-pelatihan untuk pemuda dan lain sebagainya.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Yang jelas didalam melaksanakan kegiatan desa harus berkesinambungan. Dan menghasilkan kegiatan desa ada pengaspalan jalan, pembangunan drainase dan pembangunan talud.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa di dalam kegiatan mengasilkan kegiatan ada pengaspalan jalan, pembangunan drainase dan pembangunan talud. Dan didalam melaksanakan kegiatan sudah baik.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah didalam melaksanakan kegiatan desa masyarakat ikut adil dalam kegiatan tersebut :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Iya masyarakat itu adil.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Iya masyarakat ikut adil artinya adil dalam pekerjaan, adil dalam pengawasannya, dan adil dalam partisipasinya.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Iya masyarakat harus terlibat atau semua warga sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa masyarakat ikut adil dan terlibat didalam kegiatan desa.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan dengan informan adalah bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan desa yang didanai dana desa, misalnya kegiatan fisik :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Kegiatan yang didanai dana desa dilaksanakan secara swakelola.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Kegiatan yang di danai dana desa dilaksanakan swakelola untuk kegiatan fisik dan non fisik dilaksanakan swakelola.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Didalam kegiatan fisik kita menggunakan skala prioritas biarpun sudah dikatakan di RKP tapi ternyata ada lebih pesat nanti kita bikin musdes pengalihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan desa dengan cara swakelola.

b. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawabkan.

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah salah satu dari prinsip akuntabilitas yaitu menunjukkan tingkat pencapaian tujuan, apakah dalam perencanaan dana desa sudah menunjukkan tingkat pencapaian sesuai aturan :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Iya sudah menunjukkan tingkat pencapaiin sesuai aturan.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Iya yang di danai dana desa itu pencapaiannya sesuai yang ada misalkan dari kegiatan desa ada perencanaan anggaran segala macam aturan sesuai dengan pedom.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Kita sudah melaksanakan sesuai aturan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas yaitu menunjukkan tingkat pencapaian sesuai aturan sudah melaksanakan sesuai dengan aturan.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah pemerintah desa dalam kinerjanya sudah baik :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Iya sudah baik.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Alhamdulillah sudah baik, karena kita bekerja sesuai aturan.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Alhamdulillah dari tahun ke tahun dengan kita mengadakan peningkatan-peningkatan kapasitas dari perangkat desa, lembaga desa dan pelatihan-pelatihan semoga kedepannya lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa dalam kinerjanya sudah baik.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah dalam pelaksanaan kegiatan laporan sudah sesuai aturan desa :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Sudah sesuai aturan.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Insyaallah sudah sesuai aturan.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Untuk itu kita kadang mengalami kesulitan yang ada di dalam petunjuk pelaksanaan tapi kadang ada konsultasi mungkin kurang kesalahpahaman antara di desa dengan di kecamatan. Jadi kita membuat laporan sesuai petunjuk tetapi masih disalahkan yang bikin sulit bikin laporan jadi lama dan molor kita kendalanya disitu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan laporan sudah sesuai tetapi yang susah yaitu adanya kesalahpahaman antara di desa dengan di Kecamatan yang membuat laporan jadi lama.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah dalam kegiatan desa sudah sesuai visi misi kepala desa :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Iya sesuai visi misi kepala desa.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Iya sesuai dengan visi misi kepala desa, kemudian tertuang dalam RPJMDes.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Untuk visi misi kepala desa terpilih jadi otomatis sesuai karena setiap ganti kepala desa akan diperbarui RPJMDesnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa dalam kegiatan desa sudah sesuai visi misi kepala desa.

c. Partisipatif

Setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana memperkuat pengawasan dana desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawalinya :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Kita melibatkan masyarakat secara otomatis masyarakat bisa mengawal secara langsung.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Berawal dari swakelola terus kemudian melibatkan pada masyarakat secara otomatis masyarakat bisa mengawal secara langsung.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Kita melibatkan masyarakat dalam pekerjaan tersebut kita juga meminta bantuan kepada fasilitator dari kecamatan untuk mengawasi dan lembaga-lembaga desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa didalam pengawasan dana desa melibatkan masyarakat agar didalam pelaksanaan pengawasan supaya baik.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah masyarakat desa dalam musyawarah desa banyak yang mengikuti kegiatan tersebut :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Masyarakat banyak mengikuti.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Kurang mengikuti kegiatan desa.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Masyarakat kurang yang mengikuti setiap musyawarah desa pasti ada perwakilan masyarakat dari kelompok perempuan, kelompok pemuda dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa masyarakat desa kurang yang mengikuti kegiatan musyawarah desa.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan dana desa untuk kegiatan desa :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Untuk kegiatan desa kita sudah melaksanakan dengan baik.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Untuk kegiatan desa kita melaksanakan kegiatan yang didanai dengan dana desa disamping kita mengambil dari rencana kerja pembangunan kita juga harus mengacu pada aturan permendes.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Kita melaksanakan sesuai petunjuk desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan desa yang didanai dana desa sudah sesuai aturan desa.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah di pemerintah desa dalam SDM sudah baik :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Sudah baik.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Alhamdulillah sudah baik.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Sudah semakin baik karena seringnya mengikuti pelatihan-pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan disimpulkan bahwa didalam sumber daya manusia sudah baik.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Didalam anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan dan penggunaan sesuai anggaran didesa.

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah prinsip tertib dan disiplin anggaran ada 4 salah satunya taat hukum, apakah pemerintah desa dalam perencanaan dana desa sesuai aturan :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Sudah sesuai aturan.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Sesuai aturan desa.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Sudah sesuai aturan desa hanya saja dalam memasukkan data agak ribet pada aplikasi siskeudes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam perencanaan dana desa sudah sesuai aturan hanya saja dalam memasukkan data agak ribet pada aplikasi siskeudes.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah didalam pembuatan laporan kegiatan desa sudah tepat waktu :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Dibilang tepat waktu ya belum karena adanya kurang kesalahpahaman antara pemeriksa kecamatan. Bahkan kalau yang lebih mudah langsung ke dinpermades tetapi misal seperti itu kita menyalahkan prosedur yang ada harusnya ke kecamatan dulu baru ke dinpermades.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Kalau tepat waktu belum karena dari pemeriksa kecamatan kita dipersulit karena kita sudah membuat laporan sesuai tetapi dari pemeriksa kecamatan masih kurang.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Nah itu yang belum bisa karena adanya kurang kesalahpahaman antara pemeriksa di kecamatan sedangkan kalau kita langsung ke dinpermades laporan kita langsung diterima tidak seperti di kecamatan masih kurang terus padahal pada saat membuat laporan kita berusaha semaksimal mungkin agar hasilnya baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa didalam pembuatan laporan belum tepat waktu dikarenakan kurangnya kesalahpahaman antara pemeriksa di Kecamatan.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah didalam kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai prosedur :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Sesuai prosedur.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Sudah sesuai prosedur.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Sesuai prosedur kalau tidak sesuai laporan tidak akan diterima.

Berdasarkan wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa dalam membuat laporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai prosedur.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah ada kendala/hambatan dalam perencanaan dana desa dalam tertib dan disiplin anggaran :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Kita kesulitannya dalam hal pencairan karena harus mengumpulkan berkas dan yang lebih ribet dalam mengurus sayarat-syaratnya.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Kesulitannya dalam hal pencairan karena ribet dalam mengurus syarat-syaratnya.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Kadang kita kesulitannya dalam hal pencairan dan harus mengumpulkan berkas-berkas agar dalam pencairan mudah dan lebih ribet dalam mengurus syarat-syaratnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan ada kendala dalam pencairan dana karena harus mengumpulkan berkas-berkas lengkap supaya mudah dalam pencairan.

2. Perencanaan Dana Desa dengan unit analisis :

a. Perencanaan

Kegiatan untuk memperkirakan pendapat dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang.

1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana pemerintah desa dalam perencanaan dana desa :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Dalam perencanaan kita memegang pada RKP menyesuaikan dana dari alokasi dana itu sendiri jadi kegiatan harus diambil dari RKP.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Dalam perencanaan dana desa kita memegang pada RKP menyesuaikan dana kucuran dari alokasi dana itu sendiri, jadi kegiatan mana yang harus diambil dari RKP.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Pertama kita menyaring aspirasi-aspirasi masyarakat atau usulan-usulan dari musdus kita bawa ke musrem di desa nanti kita mengambil skala prioritas yang mana yang lebih penting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan dana desa pertama menyaring aspirasi masyarakat setelah itu ke musrem desa dan melaksanakan kegiatan.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana dalam kegiatan laporan perencanaan sudah sesuai aturan :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Iya sudah sesuai aturan.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Sudah sesuai aturan.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Sudah sesuai aturan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa dalam kegiatan laporan perencanaan sudah sesuai aturan desa.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan dalam perencanaan dana desa :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Kita mengadakan RAB perencanaan sesuai dengan datanya.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Kita mengadakan Musrenbangdes karena kita menggali dari wilayah dusun-dusun.

Adapun jawaban menurut bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Yang pertama kita mengadakan RAB perencanaan sesuai dengan datanya setelah itu diukur dan dihitung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa dari tindakan-tindakan dalam perencanaan dana desa yang pertama mengadakan RAB perencanaan dan setelah itu diukur dan dihitung.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah ada kendala/hambatan dalam perencanaan dana desa :

Menurut Bapak Mashuri selaku (Kepala Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Kendalanya hanya pada usulan-usulan yang kurang kesalahpahaman dengan masyarakat.

Selanjutnya jawaban menurut Bapak Slamet selaku (Sekretaris Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Kendalanya pada usulan-usulan yang terlalu banyak jadi kita harus mencari skala prioritas yang penting dahulu.

Adapun jawaban menurut Bapak Ichwan selaku (Bendahara Desa Muncang) pada tanggal 11 Januari 2021 mengatakan :

Kendalanya itu usulannya bermacam-macam biasanya yang mendapat skala prioritas penting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa ada kendala yaitu banyaknya usulan-usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas.

A. Pendamping Desa

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah aplikasi siskeudes sudah akuntabel pada tahun 2019 :

Menurut Bapak Joko selaku (Pendamping Desa) pada tanggal 19 Januari 2021 mengatakan :

Desa belum sepenuhnya menggunakan.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah dari tahun berapa pemerintah desa harus menggunakan aplikasi siskeudes :

Menurut Bapak Joko selaku (Pendamping Desa) pada tanggal 19 Januari 2021 mengatakan :

Dari tahun 2018.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah adanya aplikasi siskeudes dapat mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan laporan agar lebih mudah :

Menurut Bapak Joko selaku (Pendamping Desa) pada tanggal 19 Januari 2021 mengatakan :

Iya cuman perlu sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana perencanaan di Desa Muncang :

Menurut Bapak Joko selaku (Pendamping Desa) pada tanggal 19 Januari 2021 mengatakan :

Untuk di desa Muncang tahun 2018-2019 belum maksimal tetapi ditahun 2020 wajib menggunakan siskeudes karena semua berbasis online.

- 5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah ada kendala/hambatan dalam pelaksanaan aplikasi siskeudes tahun 2019, dan bagaimana solusinya :

Menurut Bapak Joko selaku (Pendamping Desa) pada tanggal 19 Januari 2021 mengatakan :

Untuk ditahun 2019 banyak hambatannya seperti, kemampuan operator desa dalam mengelola siskeudes, belum terselenggaranya untuk operator siskeudes untuk ditahun 2019, karena ini baru jadi desa belum sepenuhnya

menggunakan dan karena tidak berefek langsung ke dana jadi desa kurang menggunakan siskeudes tahun 2019. Dan solusinya semua desa harus mempunyai tim yang khusus membuat laporan siskeudes karena semua laporan dana desa kecuali laporan dalam bentuk fisik harus semua online.

Berdasarkan kesimpulan diatas yaitu desa Muncang dalam akuntabilitas perencanaan dana desa yaitu pada tahun 2019 ada yang sudah baik dan belum baik dalam akuntabilitas perencanaan dana desanya. Desa Muncang dalam akuntabilitas perencanaan dana desa kurang baik apalagi di dalam transparansi kurang keterbukaan kepada masyarakat dan tidak ada papan informasi dana desa supaya masyarakat tahu jumlah dana desa. Dan di dalam membuat laporan dana desa sudah akuntabel hanya saja telat dalam membuat laporan karena kurangnya sosialisasi dalam mengisi laporan online yaitu siskeudes. Untuk perencanaan dalam partisipatifnya kurang dalam melaksanakan kegiatan desa. Pada akuntabilitas tertib dan disiplin anggaran desa muncang dalam perencanaan sudah baik hanya saja dalam kegiatan desa masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan dengan baik. Pada tahun 2019 laporan dana desa sudah berbentuk aplikasi yaitu siskeudes (sistem keuangan desa) aplikasi ini terdapat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada aplikasi siskeudes dalam membuat laporan dana desa lebih mudah hanya memasukkan laporan spj menjadi data ke dalam aplikasi siskeudes. Aplikasi siskeudes ini tidak bisa mengakses langsung hanya pihak-pihak yang membuat dan menerima data tersebut.

B. Masyarakat

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah dalam melaksanakan kegiatan desa dalam pembangunan desa sudah baik, misalnya dalam infrastruktur :

Menurut Bapak Hamid selaku (warga desa Muncang) pada tanggal 22 Januari 2021 mengatakan :

Saya melihat umum dengan desa-desa yang lain karena pembangunan ada anggarannya untuk di desa Muncang sendiri kurang baik.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah dalam pemerintah desa tersebut apakah dalam perencanaan dana desa sesuai aturan desa :

Menurut Bapak Hamid selaku (warga desa Muncang) pada tanggal 22 Januari 2021 mengatakan :

Untuk perencanaan dana desa saya tidak berkecimpung langsung jadi saya kurang tau dan di balai desa tidak ada papan informasi.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah dalam pelaksanaan dana desa sudah terbuka belum :

Menurut Bapak Hamid selaku (warga desa Muncang) pada tanggal 22 Januari 2021 mengatakan :

Untuk di desa Muncang sendiri belum terbuka karena tidak ada papan informasi tentang dana desa.

Berdasarkan kesimpulan masyarakat yaitu desa Muncang dalam akuntabilitas perencanaan dana desa dari segi transparansi kurang keterbukaan kepada masyarakat dan tidak ada papan informasi serta dalam infrastruktur kurang baik.

V.2 Pembahasan atas Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Akuntabilitas perencanaan dana desa di Desa Muncang yaitu di dalam akuntabilitas meliputi (1) transparansi yaitu menginformasikan secara terbuka tentang dana desa kepada masyarakat supaya masyarakat tahu jumlah dana desa yang dipasang papan informasi atau benner di balaidesa. Di desa Muncang untuk transparansi kurang keterbukaan kepada masyarakat tidak ada papan informasi mengenai dana desa. (2) akuntabel yaitu kegiatan laporan yang sudah sesuai aturan. Dalam membuat laporan perencanaan sudah akuntabel hanya saja dalam pelaksanaan kurang maksimal. (3) Partisipatif ini untuk masyarakat karena biasanya masyarakat banyak yang mengikuti atau sebaliknya. Di desa Muncang masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa sedikit yang mengikutinya. (4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu kegiatan laporan yang dilakukan dengan sesuai aturan atau pedoman supaya tidak terjadi kesalahan di dalam membuat laporan. Dari desa Muncang dalam tertib dan disiplin anggaran sudah sesuai aturan hanya saja terjadi keterlambatan dalam membuat laporan.

Di dalam perencanaan dana desa meliputi perencanaan yaitu kegiatan laporan yang diawali dengan perencanaan supaya didalam membuat laporan sesuai dengan aturan. Didalam membuat laporan pasti yang pertama yaitu perencanaan supaya menghasilkan laporan yang sesuai aturan. Pada desa Muncang dalam membuat laporan perencanaan kurang maksimal dalam melaksanakannya. Dalam perencanaan dari sisi akuntabilitas sudah baik hanya

saja dalam melaksanakan kegiatan kurang maksimal dalam pembangunan desa. Untuk laporan kegiatan desa sudah baik hanya saja dalam melaksanakan kegiatan apalagi dalam partisipatifnya masyarakat kurang mengikuti kegiatan desa oleh karena itu ada kegiatan desa kurang berjalan dengan baik. Dalam tertib dan disiplin anggaran sudah baik hanya saja dalam membuat laporan mengalami keterlambatan.

Pada tahun 2019 laporan dana desa sudah menggunakan aplikasi yaitu siskeudes (sistem keuangan desa). Untuk di tahun 2019 beberapa desa sudah menggunakan aplikasi ini supaya mudah dalam membuat laporan dana desa. Dari desa Muncang baru menggunakan hanya saja terkendala dengan sumber daya manusia yang kurang. Dalam menggunakan aplikasi siskeudes ini terkendala dengan operator di dalam membuat laporan siskeudes dan solusinya agar ada kegiatan sosialisasi tentang cara penggunaan aplikasi siskeudes.

BAB VI

PENUTUP

VI.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai akuntabilitas perencanaan dana desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tahun 2019 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Untuk di Desa Muncang kurang baik di dalam transparansi kurangnya keterbukaan tidak terpasang papan informasi mengenai dana desa. Dalam membuat laporan baik hanya saja dalam pelaksanaan kegiatan kurang maksimal misal dalam pembangunan fisik. Untuk kegiatan desa masyarakat kurang dalam mengikutinya. Didalam pelaksanaan akuntabilitas yaitu ada:

- a. Tranparansi, untuk desa Muncang yang kurang dalam transparansi dan tidak terpasang papan informasi mengenai dana desa.
- b. Akuntabel, untuk desa Muncang sudah akuntabel hanya saja dalam pelaksanaan kegiatan kurang baik dalam pembangunan fisik.
- c. Partisipatif, untuk desa Muncang, dalam partisipatifnya masyarakat kurang dalam mengikuti kegiatan agar lebih baik lagi desa memperbanyak kegiatan desa dalam pembangunan desa supaya lebih nyaman dan menarik masyarakat agar lebih banyak lagi mengikuti kegiatan desa misalnya musrenbangdes.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran, untuk desa Muncang dalam membuat laporan agak sedikit lambat mengirimnya.

Dalam perencanaan dana desa:

Perencanaan, untuk desa Muncang didalam perencanaan sudah sesuai hanya saja banyak usulan-usulan yang masuk dalam pelaksanaan kegiatan jadi kita harus memprioritaskan dahulu mana yang harus dilaksanakan dalam membuat laporan perencanaan sudah sesuai format aplikasi siskeudes kita hanya masukkan angka.

Untuk perencanaan dana desa biasanya membuat laporan dengan spj pada tahun 2019 serba online yaitu dengan aplikasi siskeudes supaya lebih mudah dalam membuat laporan.

Faktor kendala serta solusi dari akuntabilitas perencanaan dana desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yaitu pada transparansi kurangnya keterbukaan kepada masyarakat mengenai dana desa. Dalam partisipatifnya kurang dalam pelaksanaan kegiatan dan pada membuat laporan perencanaan yang kurang maksimal karena kurangnya sosialisasi pada aplikasi siskeudes (sistem keuangan desa) ini penting sekali sebab kalau tidak memperbanyak sosialisasi tentang aplikasi siskeudes maka dalam melaksanakan aplikasi siskeudes mengalami kesulitan pada saat memasukkan data pada laporan siskeudes. Adapun solusinya yaitu setiap desa harus ada sosialisasi tentang aplikasi siskeudes karena penting sekali dalam pembuatan laporan. Apalagi di zaman sekarang serba canggih semua harus online oleh karena itu setiap desa harus melaksanakan sosialisasi aplikasi siskeudes.

VI.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka peneliti memberikan rekomendasi (saran) sebagai berikut :

1. Dalam Transparansi desa Muncang kurang keterbukaan kepada masyarakat mengenai dana desa untuk ditahun berikutnya supaya lebih terbuka kepada masyarakat mengenai dana desa dan memasang papan informasi dan banner tentang dana desa.
2. Dalam membuat laporan sudah akuntabel hanya saja dalam pelaksanaan kegiatan kurang maksimal untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan selanjutnya desa Muncang dalam pelaksanaan kegiatan lebih baik lagi dari kegiatan sebelumnya
3. Di dalam partisipatif masyarakat kurang mengikuti kegiatan desa oleh karena itu untuk kegiatan selanjutnya lebih menarik perhatian masyarakat supaya masyarakat banyak yang mengikuti kegiatan desa.
4. Dalam tertib dan disiplin anggaran dalam membuat laporan terjadi keterlambatan dalam mengirimnya agar lebih baik lagi dalam membuat laporan setiap desa harus lebih semangat lagi didalam membuat laporan atau sebelum batas akhir mengirimnya sudah jadi.
5. Untuk membuat laporan siskeudes harus ditingkatkan lagi karena pada format perencanaan yang ada pada aplikasi siskeudes lumayan ribet seharusnya dari Kecamatan memperbanyak sosialisasi mengenai siskeudes di desa supaya dalam membuat laporan siskeudes lebih mudah. Untuk tahun berikutnya setiap

desa pasti mempunyai website sendiri supaya lebih aktif lagi desa memperbanyak mengupload kegiatan desa atau info-info mengenai desa dan dana desa agar website tersebut tidak untuk tampilan saja tetapi banyak informasi mengenai kegiatan desa agar masyarakat lebih mudah dalam mencari informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bihamding, H. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Djaenuri H.M. Aries, d. (2010). *Sisitem Pemerintahan Desa*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Djoko Suyono. M, S. (2018). *Diktat Manajemen Pemerintahan Desa*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- Djoko Suyono. M, S. (2018). *Diktat Manajemen*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- Dwi Febri Arifiyanto, T. K. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* , 473-485.
- Icuk Rangga Bawono, E. S. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo.
- Lapananda, Y. (2016). *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta Selatan: PT Wahana Semesta Intermedia.
- Moleong, P. D. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prof. Dr Sadu Wasistiono, M. I. (2019). *Administrasi Pemerintahan Desa*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sadu, W. (2019). *Administrasi Pemerintahan Desa*. Banten: Universitas Terbuka.
- Siti Ainul Wida, D. S. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa . *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* , 148-152.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wahyu, P. A. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 1-4.
- Yustisia, T. V. (2016). *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta Selatan: Visimedia.

Undang-undang dan Peraturan-peraturan :

Undang-undang No 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No 6 Tahun 2014. Tentang Dana Desa.

Perbup Kabupaten Pematang No 38 Tahun 2018. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Judul Penelitian :

**AKUNTABILITAS PERENCANAAN DANA DESA DI
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019.**

2. Petunjuk Wawancara :

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk memberikan informasi mengenai Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019. Keberhasilan peneliti ini akan sangat bergantung kepada kelengkapan jawaban untuk dimohon dengan sangat sadar agar Bapak/Ibu/Sdr dapat memberikan jawaban dengan lengkap, jujur dan benar.

3. Identitas Informan :

Nama	:.....
Jenis Kelamin	:L/P
Pekerjaan (Jabatan)	:.....
Alamat	:.....
Tingkat Pendidikan	:.....

Pertanyaan Wawancara

1. Akuntabilitas Dana Desa

A. Transparansi

- a) Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari dana desa?
- b) Menurut Bapak/Ibu/Sdr prinsip transparansi ada 3 salah satunya ada informasi kebijakan apakah pemerintah desa sudah melaksanakan kebijakan desa sesuai aturan?
- c) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apa saja yang dihasilkan dari kegiatan desa yang didanai dana desa ?
- d) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah di dalam melaksanakan kegiatan desa masyarakat ikut dilibatkan dalam kegiatan tersebut ?
- e) Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan desa yang didanai desa, misalnya kegiatan fisik ?

B. Akuntabel

- a) Menurut Bapak/Ibu/Sdr salah satu dari prinsip akuntabilitas yaitu menunjukkan tingkat pencapaian tujuan, apakah dalam perencanaan dana desa sudah menunjukkan tingkat pencapaian sesuai aturan ?

- b) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah pemerintah desa dalam kinerjanya sudah baik ?
- c) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah dalam pelaksanaan kegiatan laporan sudah sesuai aturan desa ?
- d) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah dalam kegiatan desa sudah sesuai visi misi kepala desa tersebut ?

C. Partisipatif

- a) Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana memperkuat pengawasan dana desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawalinya ?
- b) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah masyarakat desa dalam musyawarah desa banyak yang mengikuti kegiatan tersebut ?
- c) Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan dana desa untuk kegiatan desa ?
- d) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah di pemerintah desa dalam sumber daya manusianya (SDM) sudah baik ?

D. Tertib dan disiplin anggaran

- a) Menurut Bapak/Ibu/Sdr prinsip tertib dan disiplin anggaran ada 4 (empat) salah satunya taat hukum apakah pemerintah desa dalam perencanaan dana desa sesuai aturan ?
- b) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah di dalam pembuatan laporan kegiatan desa sudah tepat waktu ?

- c) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah didalam kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai prosedur ?
- d) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah ada kendala/hambatan dalam perencanaan dana desa dalam tertib dan disiplin anggaran ?

2. Perencanaan Dana Desa

A. Perencanaan

- a) Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana pemerintah desa dalam perencanaan pengelolaan dana desa?
- b) Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana dalam kegiatan laporan perencanaan sudah sesuai aturan?
- c) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan dalam perencanaan dana desa ?
- d) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah ada kendala atau hambatan dalam perencanaan dana desa ?

A. Wawancara untuk Tim PendampingDesa

- a) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah aplikasi siskeudes sudah akuntabel pada tahun 2019 ?
- b) Menurut Bapak/Ibu/Sdr dari tahun berapa pemerintah desa harus menggunakan aplikasi siskeudes ?
- c) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah adanya aplikasi siskeudes dapat mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan laporan agar lebih mudah ?



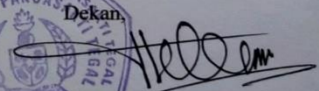
- d) Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana perencanaan di Desa Muncang ?
- e) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan aplikasi siskeudes tahun 2019, dan bagaimana solusinya ?

B. Wawancara Untuk Tokoh Masyarakat



- a) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah dalam melaksanakan kegiatan desa dalam pembangunan desa sudah baik, misalnya dalam infrastruktur ?
- b) Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana kepala desa dalam pemerintahannya sudah baik ?
- c) Menurut Bapak/Ibu/Sdr dalam pemerintah desa tersebut apakah dalam perencanaan dana desa sesuai aturan desa?
- d) Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah dalam pelaksanaan dana desa sudah terbuka belum ?

TERIMA KASIH


Lampiran 2:

	YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PRODI : ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B) ILMU KOMUNIKASI (SK. Nomor : 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014) Jl. Halmahera KM. 1 Telp. (0283) 323290 Tegal	
	<hr/>	
Nomor	: 515/K/A-4/FISIP-UPS/I/2020	14 Januari 2020
Lampiran	: -	
Perihal	: Ijin Pra Research	
Kepada	: Yth. Kepala Desa	
	1. Desa Muncang	
	2. Desa Kebondaran	
	Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang	
Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak berkenan memberi ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :		
N a m a	: Farah Dina Dewi Navulani	
NPM	: 2116500019	
Tempat, tgl. Lahir	: Pekalongan, 8 Januari 1998	
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan	
Alamat	: Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kab. Pemalang.	
Untuk menjalankan pra research di Instansi yang Bapak pimpin. Perlu kiranya kami beritahukan bahwa pra research ini dijalankan oleh yang bersangkutan dalam rangka pengumpulan data untuk pembuatan skripsi.		
Adapun Judul Skripsi : " Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Muncang dan Desa Kebondaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang) " .		
Atas kebijaksanaan dan perhatian Bapak disampaikan terima kasih.		
		Dekan  Dr. Nuridin, SH.MH NIDN. 0610116002

Lampiran 3:

	YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PRODI : ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B) ILMU KOMUNIKASI (SK. Nomor : 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014) Jl. Halmahera KM. 1 Telp. (0283) 323290 Tegal	
Nomor	: 080/K/A-4/FISIP/UPS/XII/2020	30 Desember 2020
Lampiran	: -	
Perihal	: Ijin Research	
Kepada : Yth. Ka. Kesbangpol Kab. Pemalang Di - Kabupaten Pemalang		
Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu berkenan memberi ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :		
N a m a	: Farah Dina Dewi N	
NPM	: 2116500019	
Tempat, tgl. Lahir	: Pekalongan, 8 Januari 1998	
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan	
Alamat	: Desa Muncang Rt.031/004 Bodeh, Kabupaten Pemalang	
Untuk menjalankan research di Kantor Kantor Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.		
Perlu kiranya kami beritahukan bahwa research ini dijalankan oleh yang bersangkutan dalam rangka pembuatan skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintah Universitas Pancasakti Tegal. Adapun Judul Skripsi : " Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Muncang, Bodeh dan Kebandaraan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang) ".		
Atas kebijaksanaan dan perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.		
		 F. I. S. D. Nuridin, SH.MH NIDN. 0610116002
Tembusan Yth : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bappeda Kab. Pemalang 2. Kepala Dinpermasdes Kab. Pemalang 3. Camat Bodeh Kab. Pemalang 4. Kepala Desa Muncang di Kec. Bodeh 5. Kepala Desa Bodeh di Kec. Bodeh 6. Kepala Desa Kebandaraan di Kec. Bodeh 		

Lampiran 4:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SURAT REKOMENDASI
NOMOR : 072/08/ I / 2021

I. **Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 : 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070 / 265 / 204 tanggal 20 Februari 2004;

II. **Membaca** : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal Nomor : 080/K/A-4/FISIP/UPS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 Perihal permohonan izin research

Pada prinsipnya kami Tidak Keberatan / Dapat menerima atas pelaksanaan Penelitian / Mencari Data dan Praktik Kerja Lapangan di Kabupaten Pemalang.

III. **Yang dilaksanakan oleh** :

1. **Nama** : **Farah Dina Dewi Navulani**

2. **Kebangsaan** : Indonesia

3. **Alamat** : Muncang RT. 031 / RW. 004, Desa Muncang Kec. Bodeh

4. **Pekerjaan** : Pelajar/ Mahasiswa

5. **Penanggung Jawab** : **Dr. Nuridin, SH.MM.**

6. **Maksud dan Tujuan** : Dalam rangka kegiatan research untuk pembuatan Skripsi dengan judul: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019 (studi kasus di Desa Muncang, Bodeh dan Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

7. **Lokasi** : Desa Muncang, Desa Bodeh dan Desa Kebandaran Kec. Bodeh Kab. Pemalang

8. **Dengan ketentuan sebagai berikut** :

a. *Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melapor Kepada Camat/ Instansi yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapat petunjuk seperlunya;*

b. *Pelaksanaan penelitian/ mencari data tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kepentingan umum dan stabilitas Pemerintahan;*

c. *Tidak membahas politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya keamanan dan ketentraman;*

d. *Untuk penelitian yang mendapatkan dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun Luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan;*

e. *Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila tidak mentaati/ mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek lokasi kegiatan menolak untuk menerima;*

f. *Selama kegiatan penelitian, pengambilan data, studi pendahuluan dan Praktek kerja lapangan harus menggunakan protokol kesehatan (covid 19)*

IV. **Surat Permohonan Pengambilan Sampel / mencari data ini berlaku** :
5 Januari 2021 s/d 5 Maret 2021


V. **Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum**

Pemalang, 4 Januari 2021
An. BUPATI PEMALANG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Ub. Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas

Tembusan


1. Bupati Pemalang

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang (Sbg Laporan).


KUSTANTO, S.Sos
 Penata
 NIP. 19670226 200904 1 001

Jalan Mochtar No. 6 Telp. (0284) 321317 Fax. 323067 Pemalang

Lampiran 5:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SURAT IJIN PENELITIAN
NOMOR : 072 / 08 / I / 2021 / BAPPEDA

Dasar : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2004 Tentang Persyaratan Ijin Survey/Riset/KKL/PKL di Jawa Tengah.
3. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesbangpol Kab. Pemalang Nomor : 072 / 08 / I / 2020 tanggal 4 Januari 2020.

Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal Nomor : 080/K/A-4/FISIP-UPS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 Perihal Permohonan Ijin Research.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang memberikan Ijin Penelitian / Mencari Data dan Praktik Kerja Lapangan / Magang/ KKN kepada :

Nama : **FARAH DINA DEWI NAVULANI**
NIM : 2116500019
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : RT.031 RW.004 Desa Muncang Kec.Bodeh Kab. Pemalang
Penanggungjawab : **Dr. NURIDIN, S.H., M.M**
Maksud dan Tujuan : Dalam rangka kegiatan research pengambilan data untuk pembuatan Skripsi dengan judul : "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Muncang, Bodeh dan Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)."

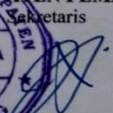
Lokasi : Desa Bodeh, Muncang dan Kebandaran Kec. Bodeh Kab.Pemalang
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 5 Januari s/d 26 5 Maret 2021

Dengan ketentuan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
2. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
3. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
4. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas;
5. Memberikan laporan hasil penelitian setelah melaksanakan penelitian kepada Bappeda Kabupaten Pemalang.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Pemalang, 4 Januari 2020

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PEMALANG
Sekretaris

MUHAMMAD SALEH, S.T, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730704 199903 1 007

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang;
2. Kepala Dinpermasdes Kab. Pemalang;
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Pemalang;
4. Kepala Desa Bodeh Kec. Bodeh Kab. Pemalang;
5. Kepala Desa Muncang Kec. Bodeh Kab. Pemalang;
6. Kepala Desa Kebandaran Kec. Bodeh. Kab. Pemalang;
7. Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. Pemalang.

Jalan Jend Soedirman Timur No 64 Telp/ Fax.(0284)324584 Pemalang 52361

Lampiran 6:

DOKUMENTASI

Desa Muncang



Pendamping Desa



Masyarakat



Lampiran 7 :

Lampiran Berita Acara Bimbingan Skripsi



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
 Sekretariat : Jl. Halmahera Km. 1 Telp. (0283) 323290

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal Nomor : 059/SK/E/FISIP-UPS/II/2021 Perihal penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi :

1. Nama : **Drs. Djoko Suyono, M.Si**
NIPY : 2451891956
2. Nama : **Unggul Sugi Harto, S.IP., M.Si**
NIPY : 14251921973

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini telah dibimbing skripsinya.

Nama : **Farah Dina Dewi Navulani**
 NPM : 2116500019
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul Skripsi : Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

No	Tahapan	Tanggal	Keterangan
1.	Penunjukkan Dosen Pembimbing	2 Januari 2021	
2.	Proposal	5 Jan – 10 Feb 2021	
3.	Rencana Penelitian	13 Feb – 13 Maret 2021	
4.	Pengumpulan Data	17 Mar – 20 Apr 2021	
5.	Analisis Data	23 April – 28 Mei 2021	
6.	Penyusunan Laporan / Penulisan Skripsi	1 Juni – 3 Juli 2021	

Demikian Berita Acara Bimbingan Skripsi ini dibuat dan digunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pembimbing II,

Unggul Sugi H, S.IP., M.Si
 NIPY. 14251921973

Pembimbing I,


Drs. Djoko Suyono, M.Si
 NIPY. 2451891956

Dekan,

Dr. Nuridin, SH., MH
 NIPY. 9351091960

Lampiran 8 :

Lampiran Berita Acara Ujian Skripsi



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
 Sekretariat : Jl. Halmahera Km. I Telp. (0283) 323290

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, **Selasa tanggal 13 Juli 2021** Pukul 08.30 wib sampai dengan selesai berdasar Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal tentang Susunan Tim Penguji Ujian Skripsi atau Pendadaran bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal tingkat Sarjana :

1. Nama : **Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si**
NIP : 196305271988032001
2. Nama : **Unggul Sugi Harto, S.IP., M.Si**
NIPY : 14251921973
3. Nama : **Drs. Djoko Suyono, M.Si**
NIPY : 2451891956

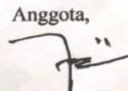
Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini telah diuji skripsinya.

Nama : **Farah Dina Dewi Navulani**
 NPM : 2116500019
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul Skripsi : Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

	Angka	Equivalen
Nilai		
Keterangan		


Demikian Berita Acara Ujian Skripsi ini dibuat untuk diketahui dan digunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Anggota,




Drs. Djoko Suyono, M.Si
NIPY. 2451891956

Sekretaris,




Unggul Sugi H, S.IP., M.Si
NIPY. 14251921973

Ketua,



Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si
NIP. 196305271988032001

Dekan,



Dr. Nuridin, SH., MH
NIPY. 9351091960